



KABUPATEN BADUNG
PENGESAHAN PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIANDAN PANGAN
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2016 – 2021



DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BADUNG
2017

BUPATI BADUNG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 5750 / 03 / HK / 2017

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

TAHUN 2016 – 2021

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa **Perubahan** Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung wajib melakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dimaksud;
 - c. bahwa Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
18. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
19. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Keputusan Bupati Badung Nomor 2028/03/HK/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung untuk periode Tahun 2016-2021;
 - b. penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung setiap tahun.
- KETIGA : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 20 September 2017

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

DAFTAR ISI

Halaman

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 5750/03/HK/2017 TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016-2021	
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG NOMOR 954TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016-2021	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG	5
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung	5
2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung	16
2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)/Kepegawaian	16
2.2.2. Perlengkapan	18
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung.....	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung	23
BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ..	26
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung.....	26
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
3.2.1. Visi	27
3.2.2. Misi	28
3.2.3. Program	28
3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Bali	29

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia	29
3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali	30
3.3.3. Telaahan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Bali	31
3.3.4. Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali	31
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	32
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis	37
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	40
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung	40
4.2 Strategi dan Kebijakan	43
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	48
BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BADUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	66
BAB VII. PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

Halaman		
Tabel 2.1.	Profil Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung	17
Tabel 2.2.	Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung ..	18
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015.....	20
Tabel 2.4.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dina Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung ...	21
Tabel 3.1.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Badung.....	33
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung.....	42
Tabel 4.2.	Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.....	47
Tabel 5.1.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017-2021 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung.....	49
Tabel 5.2.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung.....	54
Tabel 5.3.	Indikasi Rencana Program Strategis Pembangunan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017-2021 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung...	60
Tabel 6.1.	Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	67

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung 7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra. Demikian pula kalau dirunut ke atas, maka Kabupaten Badung sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Tahunan yang disebut RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung periode 2016 – 2021, penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung periode 2016 - 2021 yang telah disahkan dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 9 Tahun 2017. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung periode 2016 – 2021 memuat Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Program Kepala Daerah terpilih 5 (lima) tahun ke depan yang dijabarkan lebih lanjut secara lebih detail oleh PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, selain mengacu pada visi, misi, strategi dan kebijakan Bupati yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana dimana didalamnya memuat ajaran Tri Sakti dan Nawa Cita. Selain itu juga wajib mengakomodasi Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura Provinsi Bali, Renstra Dinas Perkebunan Propinsi Bali, sehingga dengan demikian ada harmonisasi dan sinergitas kebijakan serta program yang tertuang dalam visi dan misi kementerian (Pusat) dan visi serta misi Daerah dalam mengimplementasikan pembangunan pertanian dan pangan di Kabupaten Badung khususnya dan di Provinsi Bali pada umumnya.

Pada tataran operasional Rencana Strategis ini diharapkan menjadi dokumen strategis untuk dipedomani oleh bagi segenap unsur Dinas Pertanian dan Pangan dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1.2. Landasan Hukum

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung 2016 – 2021 ini berpedoman pada sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten

Badung Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13);

21. Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 34).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung 2016 - 2021 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikator kinerja hasil Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung periode 2016 – 2021 serta penetapan indikator kinerja Dinas Pertanian dan Pangan, bagi pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahun mendatang dalam bidang pertanian dan pangan. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung adalah sebagai pedoman segenap jajaran pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai acuan dalam penyusunan renja (rencana kerja) tahunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan
- Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
- Bab V : Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
- Bab VI : Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung periode 2016 - 2021
- Bab VII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian dan pangan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung mempunyai fungsi sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan pangan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian dan pangan;
4. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan pangan;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas bidang pertanian dan pangan.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

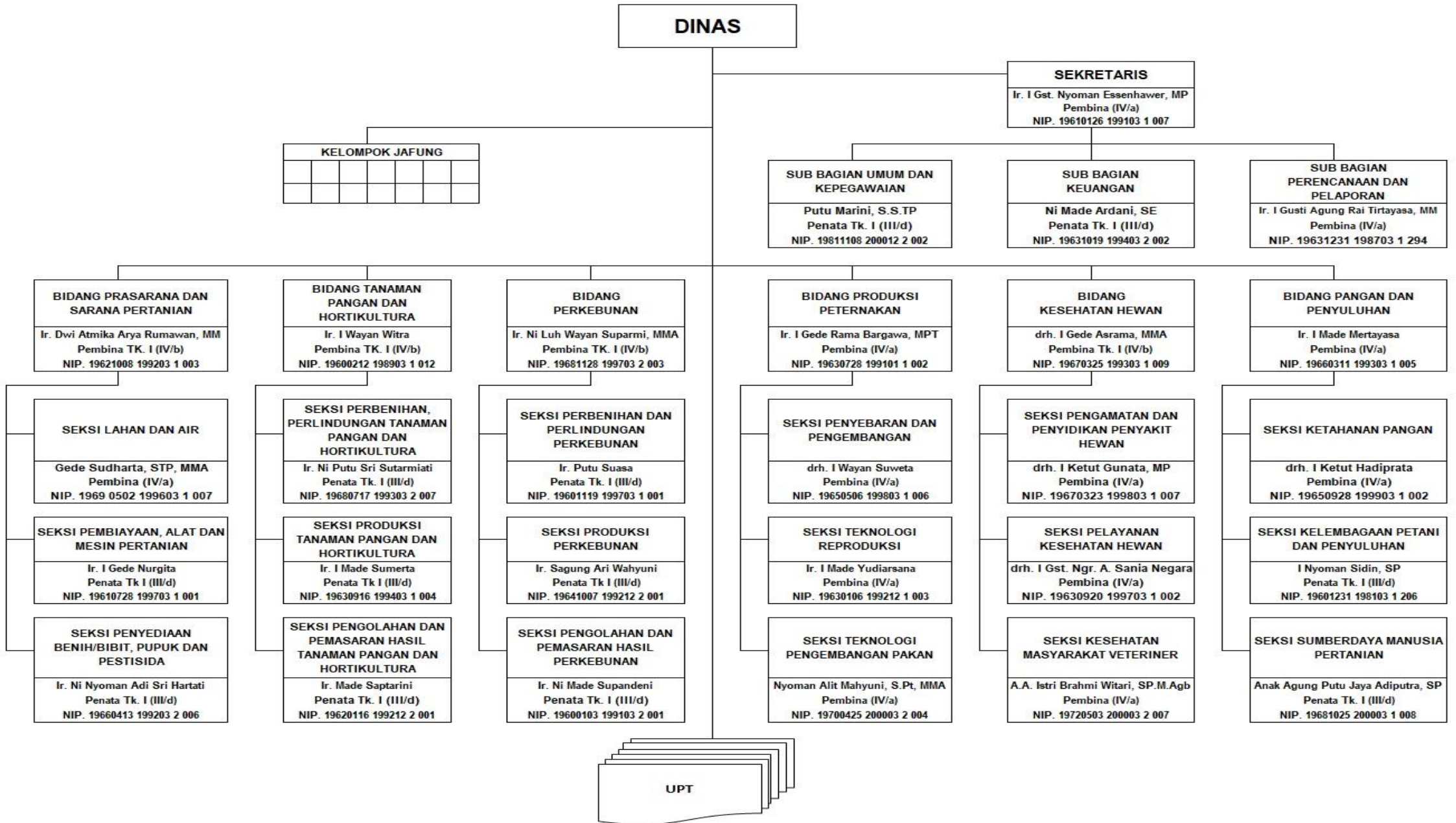
Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung terdiri atas :

1. Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
2. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri atas :
 - a. Seksi Lahan dan Air;
 - b. Seksi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian; dan
 - c. Seksi Penyediaan Benih/Bibit Tanaman, Pupuk dan Pestisida;
3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas :
 - a. Seksi Perbenihan, dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
4. Bidang Perkebunan terdiri dari :

- a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman;
 - b. Seksi Produksi Perkebunan; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
5. Bidang Produksi Peternakan terdiri dari :
 - a. Seksi Penyebaran dan Pengembangan;
 - b. Seksi Teknologi Reproduksi; dan
 - c. Seksi Teknologi Pengembangan Pakan;
 6. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 7. Bidang Pangan dan Penyuluhan terdiri atas :
 - a. Seksi Ketahanan Pangan;
 - b. Seksi Kelembagaan Petani dan Penyuluhan; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Pertanian;
 8. Unit Pelaksana Teknis
 9. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dapat dilihat dalam Gambar 2.1.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BADUNG**



Uraian tugas tiap-tiap bidang dan sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas:
 - a. menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengkoordinasikan antar Instansi / Lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional Dinas bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan;
 - d. merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyelenggarakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana kebijakan di Bidang pertanian dan pangan dalam rangka penetapan kebijakan oleh Bupati;
 - f. menyelenggarakan program untuk meningkatkan kesejahteraan petani;
 - g. menyelenggarakan program untuk meningkatkan ketahanan pangan;
 - h. menyelenggarakan program untuk meningkatkan produksi pertanian;
 - i. menyelenggarakan program untuk meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian;
 - j. menyelenggarakan program untuk memberdayakan penyuluh pertanian lapangan
 - k. menyelenggarakan program untuk meningkatkan penerapan teknologi peternakan;
 - l. menyelenggarakan program untuk mencegah dan menanggulangi penyakit ternak;
 - m. menyelenggarakan program untuk mengembangkan system data dan informasi pertanian dan pangan;
 - n. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

- o. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- r. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- s. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian, perlengkapan, barang milik daerah dan pelaporan;
- b. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan bidang-bidang dan para Sub Bagian dalam merumuskan program kerja dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan koordinasi antar instansi/lembaga terkait melalui kepala Dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan anggaran Dinas dengan masing-masing bidang ;
- g. menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran dan memberikan pelayanan pembinaan administrasi umum;

- h. mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan kebutuhan rumah tangga Dinas;
- i. mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, capaian kinerja dan laporan pengelolaan barang milik daerah, laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mengevaluasi dan memonitoring pencapaian target-target kinerja dan anggaran;
- k. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, kerumahtanggaan dan kehumasan;
- m. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- n. mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur;
- o. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- r. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

3. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- f. mengkoordinasikan pengawasan, monitoring dan evaluasi rencana kegiatan perluasan areal, pengelolaan lahan dan air.
- g. mengkoordinasikan penyediaan penyaluran/peredaran pupuk, pestisida dan sejenisnya.
- h. melaksanakan pengujian jenis pupuk dan menganalisis kebutuhan pupuk, pestisida dan prasarana lainnya untuk menunjang kelancaran pembangunan di bidang pertanian.
- i. mengkaji daya dukung alat dan mesin terhadap potensi pengembangan pertanian bekerjasama dengan lembaga penelitian.
- j. merumuskan dan mengevaluasi standard, prototipe alat dan mesin pertanian.
- k. mengkoordinasikan penyediaan, pengawasan dan evaluasi produksi benih/bibit dalam wilayah kabupaten;
- l. memfasilitasi pembiayaan antar kelompok tani;
- m. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- n. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- q. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- f. menyusun pedoman pembinaan pengembangan teknologi produksi padi, palawija dan hortikultura berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian.
- g. menyusun pedoman pembinaan penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan padi, palawija dan hortikultura sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. mengkoordinasikan pencapaian sasaran produksi padi, palawija dan hortikultura.
- i. menyelenggarakan penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan padi, palawija dan hortikultura.
- j. menyusun pedoman pembinaan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- k. melaksanakan pengkajian dan pembinaan standarisasi mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- l. melaksanakan analisa dan pembinaan pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura;
- m. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- n. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- q. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

5. Bidang Perkebunan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- f. menyelenggarakan pelaksanaan dan pengawasan diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi komoditas perkebunan;
- g. mengkoordinasikan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi dan diversifikasi komoditas perkebunan;
- h. menyelenggarakan bimbingan teknis penyiapan dan pemanfaatan lahan perkebunan;
- i. menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan kultur teknis budidaya tanaman semusim;
- j. menyusun pedoman budidaya tanaman tahunan dan tanaman semusim;
- k. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- l. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- o. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

6. Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan
- g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian, pemberantasan, pengobatan penyakit hewan, pengawasan lalu lintas ternak dan peredaran obat hewan
- h. mengevaluasi pelaksanaan pengawasan pengujian mutu bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan, perlindungan dan kesejahteraan hewan, serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner
- i. mengkoordinasi pengelolaan rumah potong hewan (RPH) milik pemerintah
- j. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- k. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- n. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

7. Bidang Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- f. melaksanakan penyusunan dan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan
- g. menyiapkan pelaksanaan koordinasi, kebijakan penyusunan rumusan kebijakan daerah, pemberian pendampingan, pemantauan program, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan.
- h. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- i. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- l. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)/Kepegawaian

Keseluruhan pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung sampai awal Tahun 2017 berjumlah 195 orang, terdiri Pegawai Negeri Sipil (PNS) 193 orang, dan Tenaga Harian Lepas (THL) 2 orang. Dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berjumlah 193 orang terdiri atas 1 orang pejabat Eselon IIb; 1 orang, pejabat eselon IIIa; 7 orang, pejabat eselon IIIb; 30 orang (24 orang pejabat di SKPD dan 6 orang Kepala UPT di kecamatan) eselon IVa; 6 orang (Kasubag TU UPT) bereselon IVb; staf 68 orang dan pegawai fungsional berjumlah 51 orang terdiri dari 1 orang Penyuluh Kabupaten dan 43 orang Penyuluh Pertanian/kehutanan Lapangan (PPL). Selanjutnya jumlah pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
 Profil Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

No	Jabatan	Eselon				Golongan					Tingkat Pendidikan							Jumlah
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	THL	S2	S1	D3	SPM A	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Dinas		1			1					1							1
2	Sekretaris Dinas			1		1					1							1
	a Kasubag. Umum dan Kepegawaian				1		1					1						1
	b Kasubag. Keuangan				1		1					1						1
	c Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan				1	1					1							1
	d Staf					1	14	10	1		1	12			12		1	26
3	Kabid Prasarana dan Sarana			1		1					1							1
	a Kasi Lahan dan Air				1	1					1							1
	b Kasi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian				1		1					1						1
	c Kasi Penyediaan Benih/Bibit Tanaman, Pupuk dan Pestisida				1		1					1						1
	d Staf					1	3	1			1	1			3			5
4	Kabid. Pertanian Tanaman Pangan dan			1		1						1						1
	a Kasi Perbenihan, dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura				1		1					1						1
	b Kasi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura				1		1					1						1
	c Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura				1		1					1						1
	d Staf						4	1				4			1			5
5	Kabid Perkebunan			1		1					1							1
	a Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman				1		1					1						1
	b Kasi Produksi Perkebunan				1		1					1						1
	c Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan				1		1					1						1
	d Staf					1	3	2			1	3			2			6
6	Kabid Produksi Peternakan			1		1					1							1
	a Kasi Penyebaran dan Pengembangan				1	1						1						1
	b Kasi Teknologi Reproduksi				1	1						1						1
	c Kasi Teknologi Pengembangan Pakan				1	1						1						1
	d Staf						3	3				2	1		3			6
7	Kabid Produksi Keswan			1		1						1						1
	a Kasi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan				1	1												1
	b Kasi Pelayanan Kesehatan Hewan				1	1						1						1
	c Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner				1	1						1						1
	d Staf						3	3				2	1		3			6
8	Kabid. Pangan dan Penyuluhan			1		1						1						1
	a Kasi Ketahanan Pangan				1	1						1						1
	b Kasi Kelembagaan Petani dan Penyuluhan				1		1					1						1
	c Kasi Sumber Daya Manusia Pertanian				1		1					1						1
	d Staf					1	1	3				1			4			5
10	Ka UPT Kecamatan				16	4	12					3	13					16
11	Kasubag TU UPT Kecamatan				16		16						14		2			16
	a Staf UPT						5	3					4		4			8
12	PPS					1						1						1
13	PPL					13	27					1	29	4	4	2		40
14	BBU							2							2			2
15	POPT					2	1					2			1			3
16	Pembibitan						1	1				1			1			2
	Jumlah	0	1	7	53	41	105	29	1	0	20	104	6	4	40	0	1	175

2.2.2. Perlengkapan

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional kantor maupun di lapangan sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tupoksi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung. Ketersediaan serta kondisi sarana/prasarana pokok pendukung kegiatan yang ada sampai tahun 2017 di masing-masing bidang dan sekretariat dapat dilihat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK
1	Kijang Station	11	11		
2	Mobil Pick Up	3	3		
3	Sepeda Motor	191	127	37	27
4	Alat Pengukur pH Tanah	14	14		
5	Mesin Ketik Merk Olivetti	12	12		
6	Mesin Ketik Merk Brother	5	5		
7	Mesin Hitung	1	1		
8	Rak Kayu	22	22		
9	Filling Besi / Metal	25	25		
10	Band Kas	9	9		
11	Meja Rapat	124	124		
12	Papan Pengumuman	6	6		
13	White Board	4	4		
14	Lemari Kayu	7	7		
15	Meja Kayu/Rotan	91	91		
16	Meja Tulis	2	2		
17	Meja Telepon	2	2		
18	Kursi Rapat	467	467		
19	Kursi Tamu	4	4		
20	Kursi Biasa	114	114		
21	Kursi Lipat	59	59		
22	Meja Komputer	1	1		
23	Sofa	20	20		
24	Lemari Pakaian	3	3		
25	AC Split	8	8		
26	Televisi	3	3		
27	Wireless	8	8		
28	Kamera photo	5	5		
29	Handycam	1	1		
30	PC komputer	57	57		
31	Laptop	14	14		
32	Printer	15	12		3
33	Modem	1	1		
34	Meja Kerja Eselon II	1	1		
35	Meja Kerja Eselon III	8	8		
36	Meja Kerja Eselon IV	28	28		
37	Kursi Kerja Eselon IV	31	31		
38	Projector-Attachment	4	4		
39	Telephone (PABX)	1	1		
40	Pesawat Telepone	5	5		
41	Faximile	1	1		
42	Mesin Absensi	2	2		

2.3. Kinerja Pelayanan PD

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, kinerja Dinas Pertanian dan Pangan sampai saat ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, dimana tugas pokok dan fungsi telah terdistribusi secara optimal ke bidang-bidang dengan didukung sekretariat. Ada 2 (dua) bidang yang menangani kegiatan utama yaitu Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura berkaitan dengan penanganan tanaman pangan dan hortikultura yang tugasnya berkaitan dengan pencapaian pemenuhan kebutuhan pangan pokok seperti beras, palawija, sayur dan buah serta tanaman hias untuk masyarakat di Kabupaten Badung khususnya; Bidang Perkebunan yang tugasnya berkaitan dengan penanganan tanaman perkebunan dan hasil komoditi tanaman perkebunan baik untuk konsumsi masyarakat di Kabupaten Badung maupun ekspor. Kedua bidang yang menangani kegiatan utama tersebut didukung oleh bidang lainnya seperti Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian; Bidang Produksi Peternakan; Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Pangan dan Penyuluhan serta Sekretariat.

Terdistribusinya pekerjaan dan pelayanan secara optimal, berkorelasi terhadap pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai misi yang harus diemban. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai kompetensi serta sarana, prasarana dan didukung pendanaan yang memadai, juga sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan PD. Dinas Pertanian dan Pangan hingga saat ini kinerja pelayanan telah berjalan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Sebagai gambaran kinerja pelayanan PD dan hasil yang telah dicapai 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat seperti tabel 2.3 dan tabel 2.4 di bawah ini :

Pada tabel 2.3. target dan capaian kinerja tahun 2010 – 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya optimasi pemanfaatan lahan dan air dengan indikator kinerja 3 buah, yaitu : 1. Luas peningkatan kualitas penutupan lahan kritis di Kabupaten Badung 5 tahun telah tercapai 100 %, bahkan ada yang lebih, namun pada tahun 2015 realisasi tercapai hanya 40,65 ha dari target 130 ha atau 31,26 %. Tidak tercapainya realisasi sesuai target sangat tergantung pada kesiapan lahan petani untuk ditanami tanaman penghijauan. 2. Panjang Infrastruktur jaringan irigasi tingkat usaha tani yang terbangun tahun 2011 dan 2012 tidak realisasi sesuai target, namun 3 tahun berikutnya tercapai di atas 100%, hal ini disebabkan komitmen pemerintah daerah untuk segera menuntaskan perbaikan jaringan irigasi supaya petani dapat melaksanakan kegiatan usaha taninya dan tidak mengalami hambatan terutama bocornya air pada saluran irigasi yang telah diperbaiki tersebut. 3. Panjang infrastruktur jalan usaha tani yang terbangun capaiannya juga berfluktuatif ada yang melebihi 100 % dan ada juga yang kurang dari 100 %, namun demikian sama seperti pembangunan jaringan irigasi pada tingkat usaha tani pemerintah bertekad untuk menuntaskan jalan usaha tani yang masih rusak agar dapat melancarkan roda transportasi angkutan hasil pertanian produksi petani di Kabupaten Badung.

Sasaran 2 yaitu Terciptanya target produksi dan produktivitas dengan 8 indikator kinerja secara umum realisasi capaiannya 100 % bahkan lebih, walaupun ada yang kurang dari 100% tetapi realisasi capaiannya masih di atas 80 % ini menunjukkan bahwa sasaran yang didukung beberapa program dan kegiatan telah berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan.

Sasaran 3 yaitu Tercapainya target pemasaran dengan 2 indikator kinerja yaitu jumlah promosi produk pertanian/perkebunan yang rata-rata tercapai 100 %, walau masih ada yang kurang realisasinya dari 100 %, namun hasil produk pertanian petani di Kabupaten Badung sudah diperkenalkan kepada calon konsumen yang mana diharapkan terjadi transaksi antara petani produsen dan calon pembeli (konsumen). Indikator sasaran yang kedua yaitu volume pemasaran dalam negeri dan ekspor komoditi kopi realisasinya telah tercapai di atas 100 %, hal ini mengindikasikan bahwa produk kopi kabupaten badung tidak kalah kualitasnya dibandingkan produk sejenis dari kabupaten lain.

Sasaran 4 yaitu Meningkatnya unit-unit usaha rumah tangga petani dan tumbuhnya sentra produksi dengan 3 indikator kinerja yakni jumlah pertumbuhan kelas kelompok tani utama, jumlah pertumbuhan kelompok tani industri kecil dan jumlah sentra produksi yang dikembangkan realisasi capaiannya sudah 100 % bahkan ada yang melebihi, hal ini mengindikasikan bahwa ke depan pemerintah kabupaten badung

bertekad untuk mengembangkan pertanian dari pola tradisional ke pola pertanian yang berwawasan agribisnis.

Sasaran 5 yaitu Terciptanya Pasar dengan indikator kinerja jumlah produk yang sudah akses dengan hotel/supermarket, realisasi capaiannya telah mencapai di atas 100 %, hal ini mengindikasikan bahwa hasil produksi petani sudah memenuhi standar yang ditetapkan hotel/supermarket sekarang tinggal menjaga dan meningkatkan dari sisi penanganan pasca panen dan kualitas kemasannya agar lebih menarik.

Pada tabel 2.4 yakni realisasi belanja sebagai pendukung pencapaian kinerja yang telah dicanangkan 5 tahun (2010 – 2015) seperti terlihat pada tabel bahwa untuk komponen Belanja Tidak Langsung (BTL) target setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dari awal RPJMD yaitu pada tahu 2010 target Rp. 15.332.131.869 sampai akhir RPJMD yaitu tahun 2015 ditargetkan Rp. 21.283.358.498 atau dalam waktu 5 tahun mengalami peningkatan Rp. 5.951.226.629 atau 38,82 %. Realisasi capaiannya antara 79,84 % sampai 95,075 %. Ini berarti serapannya cukup tinggi.

Pada Belanja Langsung (BL) yang terdiri dari 3 komponen belanja yakni Belanja pegawai; belanja barang dan jasa dan belanja modal, juga mengalami kenaikan setiap tahunnya mulai dari awal RPJMD tahun 2010 sebesar Rp. 5.294.414.720 sampai tercapai Rp. 34.835.261.640 pada akhir RPJMD tahun 2015 atau mengalami kenaikan Rp. 29.540.846.920 atau 557,96 %, suatu peningkatan yang sangat fantastis dalam jangka waktu hanya 5 tahun. Realisasi capaiannya fluktuatif berkisar 69,68 % sampai 94,65 %.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, mengemban tugas-tugas sesuai asas otonomi daerah dan tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tentu ada kendala/ tantangan yang dihadapi, dan untuk mengetahui hal tersebut, perlu diadakan analisis terhadap keberadaan PD itu sendiri.

Analisis internal Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung memiliki kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*). Kekuatan yang dimiliki PD yaitu :

- a. Memiliki sumber daya lahan pertanian dan pangan yang cukup potensial
- b. Memiliki struktur organisasi yang jelas
- c. Didukung Sumber Daya Manusia (struktural/fungsional)
- d. Didukung dana
- e. Tersedianya data dasar pertanian dan pangan

- f. Tersedianya sarana dan prasarana

Dibalik kekuatan yang dimiliki, disisi yang lain juga mempunyai kelemahan antara lain :

- a. Semakin tingginya laju alih fungsi lahan.
- b. Terancamnya Ketahanan Pangan
- c. Menurunnya kualitas Sumber Daya Pertanian
- d. Menurunnya minat bertani di kalangan generasi muda
- e. Sinergitas Sektor Pertanian dengan sektor Pariwisata masih kurang

Menilik kekuatan dan kelemahan yang dimiliki PD, tantangan/hambatan dapat diatasi yakni dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki dan mereduksi kelemahan, untuk meraih peluang dalam rangka pengembangan pelayanan PD.

Peluang yang dapat diraih antara lain :

1. Mengoptimalkan peningkatan kemampuan sumber daya manusia baik aparat maupun petani melalui diklat, bimbingan teknis, kursus dan sejenisnya
2. Mengoptimalkan potensi lahan pertanian dan perkebunan yang masih tersedia dengan memanfaatkan rekayasa teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna.
3. Memberdayakan generasi muda untuk mau menekuni pertanian dengan memberikan insentif, pengelolaan/manajemen usaha tani secara modern dengan pendekatan agribisnis dan kemudahan-kemudahan lainnya dalam menekuni usaha tani
4. Meningkatkan prasarana/sarana untuk memperlancar transportasi hasil-hasil pertanian dan hasil perkebunan
5. Meningkatkan kuantitas dan mutu produksi hasil pertanian/perkebunan dan pengolahan hasil yang lebih variatif dan higienis
6. Meningkatkan akses hasil-hasil produksi pertanian dengan pelaku pariwisata seperti hotel, restoran dsbnya.

Dengan dukungan *stakeholder* dan *political will* dari pemerintah, maka tantangan niscaya dapat dieleminir dan peluang pengembangan pelayanan PD ke depan dapat diupayakan lebih optimal. Yang masih menjadi kendala saat ini adalah masih rendahnya minat investor untuk menginvestasikan modalnya di bidang pertanian dan perkebunan, baik secara individu maupun menerapkan pola kemitraan dengan petani/kelompok tani yang ditunjang iklim kondusif, dimana para pihak saling diuntungkan. Peluang untuk hal tersebut di Kabupaten Badung masih terbuka lebar. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi daerah, salah satunya mungkin dapat ditempuh dengan mengencangkan promosi bahwa di Kabupaten Badung masih mungkin untuk pengembangan pertanian dalam arti luas, terutama di wilayah Kabupaten Badung Utara, khususnya di Kecamatan Petang. Potensi yang bisa digarap dan berpeluang untuk dikembangkan adalah komoditi

hortikultura dengan pertimbangan didukung agroklimat yang cocok, tanah yang subur dan peluang pasar yang masih terbuka utamanya komoditi organik (sayur, bunga dan buah). Didukung regulasi dan kemudahan – kemudahan antara lain penyederhanaan dalam prosedur perijinan yang sanggup diakses oleh para investor dengan mudah dan biaya yang terjangkau, nampaknya peluang ini masih terbuka lebar.

Sinergitas antara pertanian dan pariwisata sebagaimana tertuang dalam salah satu misi Bupati adalah kebijakan yang tepat untuk diimplementasikan mengingat Kabupaten Badung salah satu destinasi pariwisata yang sudah terkenal karena keindahan alamnya, dari sisi pertanian harus ditangkap sebagai peluang untuk pengembangan agroekotourism dan peningkatan kualitas hasil-hasil pertanian untuk memenuhi konsumsi wisatawan saat berkunjung ke lokasi. Di Badung sudah banyak dikembangkan desa wisata untuk meladeni para wisatawan dan peluang ini bisa dikerjasamakan antara petani produsen dengan desa wisata itu sendiri untuk pemenuhan dan kebutuhan daripada wisatawan tersebut.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

Potensi Kabupaten Badung sebagai daerah pertanian dan pangan selain didukung oleh potensi sumber daya alam, juga didukung oleh potensi sumber daya manusianya. Jumlah penduduk Kabupaten Badung menurut Data BPS Badung Tahun 2017 adalah 630.000 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 1.505 jiwa/km² dan tingkat kepadatan tertinggi berada pada wilayah Kecamatan Kuta yakni 5.866 jiwa/km². Berdasarkan jenis kelaminnya terdiri dari laki-laki 321.000,30 jiwa dan perempuan 308.000,70 jiwa. Dari jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), sebanyak 32.161 jiwa di antaranya atau sekitar 9.49 % bermata pencaharian pada sektor pertanian yaitu pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan (*Sumber : Badung Dalam Angka 2017*)

Lahan sawah dan lahan kering merupakan faktor utama dalam usaha pertanian khususnya komoditas tanaman pangan dan perkebunan. Dengan berkembangnya kemajuan pembangunan di bidang industri jasa, khususnya pembangunan jasa akomodasi pariwisata yang juga merupakan sumber utama pendapatan daerah Kabupaten Badung, tentunya banyak menghabiskan ruang dan lahan untuk dibangun, demikian juga pembangunan gedung kantor, jalan dan prasarana/ sarana penunjang lainnya yang juga banyak membutuhkan lahan, hingga kini lahan sawah/kebun/ tegalan cenderung mengalami perubahan status dari tahun ke tahun terutama dari lahan pertanian ke non pertanian. Kondisi ini merupakan tantangan yang harus dihadapi, khususnya pada sektor pertanian tanaman pangan, sementara di lain pihak permintaan terhadap penyediaan pangan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan permintaan masyarakat, sebagai dampak dari peningkatan jumlah penduduk serta meningkatnya pendapatan masyarakat. Jumlah lahan sawah hingga akhir tahun 2016 tercatat 9.976 ha, dari sebelumnya tahun 2014 seluas 9.984 ha, dimana pada tahun 2015 terdapat alih fungsi dari lahan pertanian ke lahan non pertanian seluas 40 ha rinciannya di Kecamatan Petang 4 ha; di Kecamatan Kuta Utara 17 Ha; di Kecamatan Mengwi 12 ha dan di Kecamatan Kuta 7 ha. Sebagian alih fungsi tersebut diperuntukan untuk perumahan, lahan kering, industri dan sarana/prasarana lainnya. Ada sedikit hal yang menggembirakan pada tahun 2015 terdapat pencetakan sawah baru di Kecamatan Petang seluas 25 ha yang dapat menambah luas areal produksi padi. Berdasarkan kondisi seperti tersebut di atas, identifikasi permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menurunnya kualitas sumber daya alam pertanian
2. Adanya ancaman terhadap ketahanan pangan
3. Menurunnya minat generasi muda yang mau bekerja pada sektor pertanian
4. Rendahnya sinergitas pertanian dengan pariwisata
5. Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang belum tertangani secara tuntas yang berpotensi menurunkan hasil produksi, baik jumlah maupun mutunya.
6. Rendahnya adopsi inovasi pertanian.
7. Alih fungsi lahan yang cenderung meningkat setiap tahunnya
8. Keterbatasan debit air irigasi pada saat-saat tertentu dan masih banyaknya jaringan irigasi pada tingkat usaha tani yang rusak
9. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani
10. Belum optimalnya pemakaian pupuk berimbang dan pupuk organik serta terbatasnya penggunaan benih/bibit bermutu

Melihat permasalahan yang dihadapi, maka perlu dicarikan solusi terbaik untuk mengatasi segala tantangan/hambatan yang dapat mengancam keberlanjutan sektor pertanian dalam arti luas yang sejatinya adalah warisan budaya leluhur yang patut dipertahankan dan dilestarikan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Dalam kurun lima tahun ke depan, Dinas Pertanian dan Pangan akan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki secara optimal untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan, tentunya dengan kerjasama yang baik antara segenap jajaran PD dan pemangku kepentingan yang peduli dengan sektor pertanian di Kabupaten Badung, dimana keberadaannya perlu dipertahankan dan dilestarikan sepanjang masa.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Badung periode 2016 – 2021 adalah ***Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berdasarkan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera.*** Visi yang ditetapkan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan pencapaian-pencapaian di segala lini pembangunan perlu dipertahankan dan dimantapkan untuk menuju

masyarakat yang damai dan sejahtera dalam kebersamaan berdasarkan falsafah Tri Hita Karana.

3.2.2. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut di atas, ada 9 (sembilan) misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran perangkat daerah sebagai pengejawantahan dari falsafah Tri Hita Karana, dimana Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung melaksanakan misi sebagai berikut :

Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, dengan tujuan :

Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, dengan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya, dengan tujuan :

Meningkatnya ketersediaan pangan, dengan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani

3.2.3. Program

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka Dinas Pertanian dan pangan Kabupaten Badung menyusun program prioritas pembangunan periode 5 (lima) tahun ke depan 2016 – 2021 yang terdiri dari 14 (empat belas) program. Program-program tersebut antara lain :

1. Program peningkatan ketahanan pangan
2. Program peningkatan kesejahteraan petani
3. Program peningkatan produksi pertanian
4. Program pengembangan sistem data / informasi pertanian
5. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian
6. Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan
7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
8. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
9. Program pengembangan agribisnis
10. Program penjaminan mutu pangan bahan asal hewan yang asuh
11. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

14. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Program-program yang hendak dicapai diuraikan dalam wujud kegiatan/sub kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan didukung pagu dana indikatif sesuai kebutuhan.

Secara tersirat bahwa apa yang telah dicanangkan dan ingin diwujudkan oleh Bupati/Wakil Bupati terpilih sesuai dengan visi, misi dan program 5 (lima) tahun kedepan sudah sejalan dengan program dan kegiatan yang ditetapkan dan akan dilaksanakan Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2016 – 2021.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Program pembangunan bidang pertanian dan pangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sudah semestinya seiring, sejalan dan bersinergi dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah dicanangkan baik dalam skala daerah maupun dalam skala nasional, dimana dalam implementasi/ pelaksanaannya harus bersinergi dan terintegrasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Keberhasilan program pemerintah daerah adalah cerminan dari keberhasilan program pemerintah pusat.

Seirama dengan rencana strategis kementerian terkait, rencana strategis PD 5 tahun ke depan bila ditarik benang merahnya, dapat dilihat dari visi dan misi renstra yang telah ditetapkan oleh tiap-tiap kementerian dan provinsi sebagai berikut :

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Visi Kementerian Pertanian RI adalah Terwujudnya Sistem Pertanian Bioindustry Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani. Dalam Renstra Kementerian Pertanian 2015 – 2019, Misi yang ditetapkan ada 4 yaitu :

- a. Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi.
- b. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing.
- c. Mewujudkan Kesejahteraan Petani.
- d. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegrasi Tinggi.

Strategi Pembangunan Pertanian 2015 – 2019 adalah :

1. Menjadikan basis produksi komoditas pangan, komoditas ekspor, penyedia bahan baku industri dan bio-energi dengan pendekatan kawasan

2. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk pertanian
3. Menyediakan prasarana dasar bidang pertanian
4. Memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran Kementerian Pertanian tahun 2015 – 2019 adalah :

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula
2. Peningkatan diversifikasi pangan
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor
4. Penyediaan bahan baku biodiversitas dan bioenergi
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali

Visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali adalah Terwujudnya Pertanian Tangguh menuju Bali MANDARA (Maju, Aman, Damai dan Sejahtera). Adapun Misi yang diemban Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali untuk menjabarkan Visi yang dicanangkan tersebut adalah :

- a. Mewujudkan kemandirian pangan melalui pendayagunaan sumber daya pertanian secara optimal dan berkelanjutan.
- b. Meningkatkan pendapatan petani melalui pengembangan system dan usaha agribisnis.

Sasaran yang ingin diwujudkan periode 2013 – 2018 adalah :

1. Meningkatnya produksi padi
2. Meningkatnya produksi sayuran
3. Meningkatnya produksi buah-buahan
4. Meningkatnya unit-unit usaha kelompok tani yang berwawasan agribisnis

3.3.3. Telaahan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Bali

Visi Dinas Perkebunan Provinsi Bali adalah Mewujudkan Perkebunan Bali yang Produktif, Efisien dan Berdaya Saing Tinggi Berdasarkan TRI HITA KARANA menuju Bali Mandara. Adapun Misi yang diemban Dinas Perkebunan Provinsi Bali untuk menjabarkan Visi yang telah dicanangkan tersebut adalah :

- a. Mendorong dan mewujudkan pemanfaatan sumber daya perkebunan melalui pemanfaatan tata ruang yang dapat mendukung keandalan ekonomi, ketahanan sosial budaya dan lingkungan hidup.

- b. Meningkatkan pendapatan usaha perkebunan dan optimalisasi nilai tambah melalui penerapan sistem agribisnis yang utuh dan berkelanjutan.
- c. Meningkatkan dukungan terhadap ketersediaan pangan

Sasaran yang ingin diwujudkan tahun 2013 – 2018 adalah :

- 1. Meningkatnya pemanfaatan potensi pengembangan perkebunan
- 2. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan
- 3. Meningkatnya mutu produk dan pemasaran
- 4. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan usaha produktif pada Subak Abian.

3.3.4. Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Tahun 2014-2018 bahwa Visi Dinas Peternakan Dan Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2014-2018 adalah : **"Terwujudnya Peternakan yang Maju, Tangguh, Berwawasan Agribisnis Berbasis Sumberdaya Lokal Menuju Bali Mandara Jilid II"**.

Untuk mencapai Visi tersebut maka ditetapkan misinya sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Dan Mempertahankan Status Kesehatan Hewan
- 2. Meningkatkan Populasi Ternak Dan Produksi Peternakan
- 3. Meningkatkan Pertumbuhan Kelembagaan Kelompok-USaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan Serta Jaminan Keamanan Pangan Hewan Yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali, maka tujuan pembangunan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Tahun 2014-2018 yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terwujudnya penurunan tingkat kesakitan ternak (%)

Sasaran : 1. Penurunan tingkat kesakitan ternak (%)

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan populasi ternak (ekor)

Sasaran : 1. Meningkatkan populasi ternak (ekor)

Bertitik tolak dari visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Tahun 2014-2018, tentunya akan menjadi semakin selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan peternakan di Kabupaten Badung tahun 2016 - 2021.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Badung, Kabupaten Badung

dengan luas wilayah 418,52 km², pada Bab VIII tentang Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang antara lain disebutkan bahwa peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) mendorong pengembangan kawasan sebagai kawasan agropolitan dan pengendalian alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis.

Dalam ketentuan umum peraturan zonasi juga disebutkan bahwa sekurang-kurangnya 70 (tujuh puluh) persen dari kawasan perdesaan merupakan peruntukkan pertanian di luar kawasan lindung. Ketentuan lain peraturan zonasi kawasan peruntukkan pertanian meliputi :

- Ketentuan umum per zonasi kawasan peruntukkan budidaya tanaman pangan
- Ketentuan umum per zonasi kawasan peruntukkan budidaya Hortikultura
- Ketentuan umum per zonasi kawasan peruntukkan budidaya perkebunan

Hal penting lainnya termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 adalah pentingnya pencapaian target luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) persen dari luas pertanian pangan yang ada. Juga termuat pencegahan dan pembatasan alih fungsi pertanian; peningkatan produktivitas lahan sawah melalui program pertanian terintegrasi dan pemantapan kawasan Agropolitan Petang berbasis pertanian hortikultura sebagai penggerak perekonomian kawasan perdesaan.

Jadi jelas semuanya telah diatur dalam tata ruang wilayah Kabupaten Badung dan sebagai tataran implementatif perlu ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Badung sehingga zona-zona kawasan kelihatan lebih detail. Pemerintah Kabupaten Badung telah memperhatikan keberadaan lahan pertanian terutama beririgasi teknis, untuk tetap dipertahankan sekurang-kurangnya 90 % dari luas lahan yang ada saat ini, mengindikasikan bahwa sektor pertanian masih mendapat perhatian dan keberpihakan dari pemerintah, karena sektor pertanian dalam arti luas masih menjadi tumpuan sebagian warga Badung untuk menghidupi keluarga akan kebutuhan pangan khususnya beras dan pangan alternatif lainnya.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Badung bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Badung sebagai pusat kegiatan nasional dan destinasi pariwisata internasional yang berkualitas, berdaya saing dan berjatidiri budaya Bali melalui sinergi pengembangan wilayah Badung Utara, Badung Tengah dan Badung Selatan secara berkelanjutan berbasis kegiatan pertanian, jasa dan kepariwisataan menuju kesejahteraan masyarakat sebagai implementasi dari falsafah *Tri Hita Karana*.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Badung tersebut diatas, maka ditetapkan 7 (tujuh) kebijakan sebagai berikut :

- a. Keterpaduan pengembangan pusat-pusat pelayanan kabupaten dengan sistem perkotaan nasional;

- b. Keterpaduan pengembangan sistem perkotaan kabupaten dengan sistem perkotaan Sarbagita;
- c. Peningkatan kualitas kepariwisataan yang didukung sistem prasarana wilayah berstandar internasional;
- d. Pengembangan wilayah Badung Utara dengan fungsi utama konservasi dan pertanian terintegrasi;
- e. Pengembangan wilayah Badung Tengah dengan fungsi utama pertanian berkelanjutan, ibukota kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional;
- f. Pengembangan wilayah Badung Selatan dengan fungsi utama kepariwisataan;
- g. Perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; dan
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Rumusan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Badung telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sehingga diharapkan :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW. Selain itu KLHS menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah ("*bio-region*" dan/atau "*bio-geo-region*").

Dengan demikian telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung diperlukan untuk pengambilan keputusan terhadap proses penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP).

Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten Badung dijabarkan melalui kebijakan dan strategi penataan ruang sebagai berikut :

- a. Keterpaduan pengembangan pusat-pusat pelayanan kabupaten dengan sistem perkotaan nasional, yang dijabarkan melalui strategi :

- 1) menterpadukan sistem perkotaan berdasarkan hierarki pelayanan dan fungsi pusat pelayanan yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);
 - 2) mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan kepariwisataan, pusat pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan tinggi, pusat pelayanan kesehatan dan pusat pelayanan transportasi ke dalam sistem perkotaan secara terpadu;
 - 3) mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan fungsi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan pusat-pusat kegiatan yang berpotensi cepat tumbuh dan sedang tumbuh;
 - 4) meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya; dan
 - 5) meningkatkan peran kota-kota kecil sebagai pusat pelayanan dari wilayah belakangnya, terutama ibukota kecamatan
- b. Keterpaduan sistem perkotaan wilayah kabupaten yang terintegrasi dengan sistem perkotaan Sarbagita, dijabarkan melalui strategi :
- 1) memantapkan peran kawasan perkotaan Kuta sebagai kota inti dari sistem perkotaan Sarbagita;
 - 2) mengembangkan kawasan perkotaan Jimbaran dan kawasan perkotaan Mangupura sebagai Kota Satelit dari sistem perkotaan Sarbagita;
 - 3) mengembangkan kerjasama antar wilayah dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur; dan
 - 4) mengembangkan kawasan perkotaan Sarbagita yang berjati diri budaya Bali dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan.
- c. Peningkatan kualitas kepariwisataan yang didukung sistem prasarana wilayah berstandar internasional, yang dijabarkan melalui strategi :
- 1) menyediakan infrastruktur berstandar internasional yang mendukung kepariwisataan;
 - 2) mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan kepariwisataan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan dan daya tampung kawasan;
 - 3) meningkatkan kualitas obyek-obyek wisata dan fasilitas pendukungnya;
 - 4) mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak harmonis dengan kegiatan kepariwisataan pada koridor menuju kawasan pariwisata; dan
 - 5) mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu dan berkualitas antar moda dan antar pusat kegiatan kepariwisataan.
- d. Pengembangan Badung Utara dengan fungsi utama konservasi dan pertanian terintegrasi, yang dijabarkan melalui strategi :

- 1) melindungi dan melestarikan kawasan hutan lindung yang terdapat di Desa Pelaga, Kecamatan Petang;
 - 2) mengembangkan hutan rakyat sebagai kawasan penyangga hutan lindung yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup;
 - 3) mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan tangkapan air hujan dan kawasan resapan air;
 - 4) mengembangkan pertanian terintegrasi yang berorientasi agribisnis meliputi penyediaan sarana-prasarana produksi, pengolahan hasil, pemasaran dan dukungan lembaga keuangan, penyuluhan dan penelitian;
 - 5) mengembangkan kelembagaan usaha ekonomi petani yang efektif, efisien, dan berdaya saing dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai; dan
 - 6) mengembangkan Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus Promosi (KDTWKp) dan Daya Tarik Wisata (DTW) berbasis agrowisata dan ekowisata.
- e. Pengembangan Badung Tengah dengan fungsi utama pertanian berkelanjutan, ibukota kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional, yang dijabarkan melalui strategi:
- 1) mengembangkan kawasan peruntukan pertanian berkelanjutan dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi dalam rangka ketahanan pangan, pelestarian lingkungan dan pelestarian budaya;
 - 2) mengembangkan sistem jaringan prasarana pada kawasan perkotaan Mangupura yang terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana perkotaan Sarbagita;
 - 3) mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan Mangupura sehingga mencerminkan perannya sebagai ibukota kabupaten dan dan pusat pelayanan umum skala regional;
 - 4) melindungi, merevitalisasi, rehabilitasi, preservasi dan/atau restorasi warisan budaya yang memiliki nilai-nilai sejarah; dan
 - 5) mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM) yang berkualitas yang ramah lingkungan melalui pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, permodalan, teknologi serta akses terhadap pasar.
- f. Pengembangan Badung Selatan dengan fungsi utama kepariwisataan, yang dijabarkan melalui strategi :
- 1) mengoptimalkan pemanfaatan ruang pada Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Tuban dan Kuta didukung penyediaan infrastruktur yang memadai berstandar internasional;
 - 2) mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu untuk meningkatkan aksesibilitas menuju pusat-pusat kegiatan kepariwisataan;

- 3) mengembangkan kawasan wisata belanja yang dilengkapi sarana-prasarana pariwisata dan pusat perbelanjaan;
 - 4) melestarikan kawasan lindung dan mengendalikan pembangunan pada kawasan rawan bencana yang berbasis mitigasi; dan
 - 5) mengembangkan kawasan pesisir dan laut secara terpadu sebagai aset utama kepariwisataan yang berkelanjutan.
- g. Perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, dijabarkan melalui strategi :
- 1) mengembangkan kawasan budidaya melalui pemanfaatan ruang sesuai peruntukan, daya dukung lahan dan daya tampung kawasan;
 - 2) mensinergikan pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - 3) mengembangkan kawasan pariwisata, KDTWKp dan DTW secara komprehensif dan terpadu dengan kegiatan pertanian yang berorientasi agribisnis;
 - 4) mengembangkan permukiman perkotaan di wilayah Badung Tengah dan wilayah Badung Selatan secara proporsional, dan membatasi pengembangan permukiman skala besar di wilayah Badung Utara;
 - 5) mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah yang menjangkau pusat-pusat kegiatan budidaya; dan
 - 6) mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi utamanya serta tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, yang dijabarkan melalui strategi :
- 1) mendukung penetapan kawasan strategis dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara sesuai kondisi lingkungan dan sosial budaya masyarakat;
 - 2) mengendalikan pengembangan kegiatan budidaya didalam dan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - 3) mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah terintegrasi dengan kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - 4) mengendalikan perubahan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara serta aset-aset pertahanan dan keamanan lainnya.

Strategi pembangunan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis dijabarkan berupa:

- a. Mengidentifikasi rencana atau program terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pembangunan berkelanjutan ;

- b. Memfasilitasi proses penyusunan program dan kebijakan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ;
- c. Penyusunan program yang memiliki keterpaduan antara fungsi perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam ;
- d. Meminimalisasi potensi dampak penting negatif lingkungan yang akan timbul sebagai akibat dari rencana, atau program ;
- e. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan kurun lima tahun ke depan dituntut lebih baik, lebih berpihak kepada petani dengan program-program unggulannya yang mampu mempertahankan ketahanan pangan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian swasembada pangan khususnya padi, jagung dan kedelai secara berkelanjutan sebagaimana dicanangkan kementerian pertanian. Pada bidang perkebunan, Kabupaten Badung melalui Dinas Pertanian dan Pangan sudah mulai melirik komoditas unggulan yang dimiliki antara lain kopi arabika dan kakao, untuk diintensifkan pengelolaannya agar dapat diekspor ke luar daerah/negeri. Demikian pula dalam bidang kehutanan lahan-lahan yang kritis maupun potensial kritis, secara bertahap sudah ditangani baik pada kawasan hutan, di luar kawasan hutan, lahan-lahan kosong milik umum maupun perorangan, serta pada kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS). Berdasarkan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Dinas Pertanian dan Pangan pada tahun 2015-2021, secara umum isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Bidang Ketahanan Pangan/Pertanian

Pemenuhan kebutuhan pangan dan diversifikasi pangan menjadi isu strategis mengingat jumlah dan perkembangan penduduk yang cenderung meningkat setiap tahunnya yang mana harus diimbangi dengan penyediaan dan cadangan pangan dalam jumlah memadai baik jumlah maupun mutunya. Diversifikasi pangan juga perlu mendapat perhatian, karena kecenderungan konsumsi beras lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi bahan pangan lainnya, namun sekarang sudah ada kecenderungan penurunan tingkat konsumsi beras.

Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian mengalami kecenderungan meningkat setiap tahunnya, juga merupakan masalah yang cukup serius dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan dan bila tidak ditangani secara serius bukan tidak mungkin menyebabkan terancamnya ketahanan pangan di Kabupaten Badung. Untuk itu

perlu segera diambil langkah konkrit untuk mempertahankan keberadaan lahan yang masih tersisa, misalnya memberikan keringanan pajak pada pemilik lahan pertanian yang berada pada kawasan jalur hijau, dan pemberian insentif bagi petani dan kemudahan-kemudahan lainnya dan segera dibuatkan regulasinya dalam bentuk PERDA (Peraturan Daerah).

Isu yang berkembang akhir-akhir ini adalah sinergi antara sektor pertanian dengan sektor pariwisata yang belum mantap, padahal Kabupaten Badung sebagai basis pariwisata di Provinsi Bali perlu didorong untuk mengembangkan pariwisata alternatif seperti ekotourism agriculture, sehingga disamping menikmati keindahan panorama kawasan persawahan pada saat-saat tertentu hasil-hasil pertanian berkualitas produksi petani dapat dijadikan sebagai oleh-oleh untuk wisatawan.

Generasi muda yang semakin jarang mau menekuni pertanian, merupakan tantangan tersendiri yang perlu segera diantisipasi mengingat tenaga kerja sekarang sudah tua-tua dan sulit dicarikan penggantinya. Berusaha tani dengan pendekatan teknologi yang efektif dan efisien, pelatihan-pelatihan dan pemberian insentif serta jaminan kepastian harga mungkin salah satu upaya untuk jalan keluarnya.

Isu yang akhir-akhir ini mengemuka adalah pertanian organik yang menghasilkan bahan pangan organik terutama untuk kebutuhan kesehatan dan tuntutan para wisatawan yang menjunjung tinggi arti pentingnya kesehatan. Hal ini juga perlu mendapat perhatian, mengingat pemanfaatan bahan organik diduga dapat meningkatkan kualitas kehidupan menjadi lebih baik, dan disisi lain untuk mengurangi pemakaian bahan-bahan non organik seperti pupuk buatan dan berbagai jenis pestisida. Lima tahun ke depan produk pertanian organik akan menjadi solusi yang baik untuk kesehatan secara alami dan para petani perlu dibina secara kontinyu untuk selalu berinovasi guna menghasilkan produk organik kerjasama dengan peternak agar limbahnya bisa diolah sebagai pupuk untuk tanaman.

2. Bidang Perkebunan

Pada bidang perkebunan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan perlu mendapat perhatian, terutama komoditas unggulan seperti kopi dan kakao. Demikian pula kualitas bibit tanaman harus dari bibit unggul bermutu agar hasil produksi yang diperoleh nanti berkualitas. Jenis komoditas yang berorientasi export tersebut perlu diintensifkan budidayanya dan penanganan pasca panennya yang lebih intensif.

Komoditas kopi yang telah mendapatkan sertifikat LESOS (Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman) patut didukung dan dikembangkan, karena sudah menjadi *trend* masyarakat penggemar kopi, menikmati kopi organik yang terbebas dari pengaruh

bahan-bahan kimiawi sudah sepantasnya dinikmati tanpa ada rasa was-was. Penggunaan bibit yang bersertifikat dan bermutu dari lembaga bersertifikasi benih juga menjadi isu utama dalam pengembangan komoditas perkebunan lainnya. Peremajaan dan rehabilitasi tanaman-tanaman yang sudah tua perlu diregenerasi guna meningkatkan produksi dan produktivitas untuk komoditi yang bernilai ekonomi dan ekspor.

3. Bidang Peternakan

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi permintaan kebutuhan pasar akan komoditi sektor peternakan baik secara kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keragamannya baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Pembangunan peternakan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaannya menjadi lebih tepat sasaran. Posisi geostrategis Kabupaten Badung dalam konstelasi regional dan nasional merupakan pusat kegiatan nasional dan destinasi pariwisata dunia menjadikan pembangunan peternakan memiliki tantangan yang sangat kompleks. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunannya sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan peternakan yang akan dihadapi Kabupaten Badung pada tahun 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu-isu strategis yang dihadapi antara lain :

- 1) Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumber Daya Peternakan Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Serta Penguatan Sentra Komoditas Unggulan.
- 2) Perubahan iklim global menyebabkan wabah penyakit-penyakit hewan yang baru muncul dan yang muncul kembali (emerging and re-emerging animal diseases) yang dapat menular ke manusia (zoonosis). Wabah Zoonosis dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial, atau pertahanan dan keamanan. Diperlukan pengendalian penyakit hewan menular yang lebih intensif.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 016 – 2021, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dijabarkan lebih rinci ke dalam Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2021 yang juga berisi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

Tujuan mengindikasikan target yang ingin dicapai dalam jangka menengah biasanya 5 (lima) tahun, sedangkan sasaran adalah target yang ingin dicapai 1 tahun yang hasilnya dapat diuji/diukur lewat program/kegiatan yang telah ditetapkan. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas mendukung pencapaian Misi ke-3, Misi ke-7 dan Misi ke-9 Bupati terpilih, kemudian diuraikan lebih lanjut dalam formula tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Misi 7 : Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Tujuan dan sasaran yang di gunakan adalah sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya peningkatan pemanfaatan lahan pertanian

- | | | |
|-------------------|---|---|
| 1. Sasaran | : | Meningkatnya luas tanam komoditi pertanian |
| Indikator | : | Luas tanam komoditi padi, palawija dan hortikultura |

Misi 9 : Memperkuat Pembangunan Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan yang Bersinergi dengan Pariwisata Berbasis Budaya

Tujuan dan sasaran yang di gunakan adalah sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Produksi Pertanian

- | | | |
|-------------------|---|--|
| 1. Sasaran | : | Meningkatnya Produksi Padi, Palawija, Hortikultura, Kopi dan Kakao |
| Indikator | : | - Produktivitas Padi
- Produktivitas Cabai
- Produktivitas Kedelai |

- Jumlah produksi kopi
 - Jumlah Produksi Kakao
- 2. Sasaran** : Meningkatnya Aktivitas Agribisnis
- Indikator** : - Jumlah petani/Kelompok yang produksi komoditasnya berkualitas industri
- 3. Sasaran** : Meningkatkan Produksi Hasil Peternakan
- Indikator** : - Jumlah populasi ternak
- Jumlah Akseptor IB
 - Jumlah Kasus penyakit ternak yang tertangani
- 4. Sasaran** : Meningkatnya pengelolaan perencanaan, pengembangan dan pelayanan yang mendukung sektor Pertanian
- Indikator** : - Capaian realisasi anggaran Dinas Pertanian dan Pangan
- Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan
 - Jumlah kunjungan yang dilakukan oleh tenaga fungsional

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini :

4.2. Strategi dan Kebijakan

Guna mencapai tujuan dan sasaran, diperlukan strategi dan kebijakan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, sedangkan kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran. Lebih lanjut kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan kebijakan dan program dibahas dalam bab selanjutnya.

Strategi dan Kebijakan serta program yang mendukung dalam rangka pencapaian sasaran akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung pada tahun 2016 - 2021 sesuai misi Bupati adalah sebagai berikut :

Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang di gunakan adalah sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Pertanian

- 1. Sasaran** : Meningkatkan luas tanam komoditi pertanian
- Strategi** : Mengintensifkan pola tanam
- Kebijakan** : Memantapkan program intensifikasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna
- Program** :
 - Peningkatan Ketahanan Pangan
 - Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Misi 9 : Memperkuat Pembangunan Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan yang Bersinergi dengan Pariwisata Berbasis Budaya

Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang di gunakan adalah sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya Produksi Pangan

- 1. Sasaran** : Meningkatkan Produksi Padi, Palawija, Hortikultura, Kopi dan Kakao
- Strategi** : Meningkatkan peranan teknologi dan budidaya pertanian
- Kebijakan** : Penerapan Teknologi budidaya tepat guna
- Program** :
 - Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - Program peningkatan produksi pertanian
 - Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Pertanian
- 2. Sasaran** : Meningkatnya Aktivitas Agribisnis
- Strategi** : Meningkatkan adopsi teknologi pertanian
- Kebijakan** : Peningkatan inovasi teknologi, penyediaan sarana prasarana serta penguatan modal dan kelembagaan
- Program** :
- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 - Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
 - Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian
 - Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Pertanian
- 3. Sasaran** : Meningkatkan Populasi ternak
- Strategi** : Mengembangkan potensi Peternakan berdasarkan potensi wilayah
- Kebijakan** : Mengoptimalkan potensi peternakan
- Program** :
- Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian
 - Program peningkatan produksi pertanian
 - Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Pertanian
 - Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
 - Program Pengembangan Agribisnis
 - Program peningkatan produksi pertanian
 - Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
 - Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan yang Asuh

- 4. Sasaran** : Meningkatnya pengelolaan perencanaan, pengembangan dan pelayanan yang mendukung sektor Pertanian
- Strategi** : - Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Pangan
 - Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Dinas Pertanian dan Pangan
 - Optimalisasi pelaksanaan kegiatan fisik pada Dinas Pertanian dan Pangan
- Kebijakan** : - Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah.
 - Meningkatkan Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Dinas sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).
 - Peningkatan SDM Aparatur dan Pemenuhan sarana dan prasarana
- Program** : - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Pertanian
 - Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD
 - Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapangan
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Guna merealisasikan Tujuan dan Sasaran serta cara mencapainya dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini :

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan pada bidang pertanian dan Pangan ditetapkan indikator kinerja yang didukung program dan kegiatan serta pendanaan indikatif selama 5 Tahun (2016-2021) yang terdiri dari :

Tabel 5.1. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan Pendanaan Tahun 2017-2021 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

Tabel 5.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

Tabel 5.3. Indikasi Rencana Program Strategis Pembangunan yang disertai kebutuhan Pendanaan Tahun 2017-2021 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

Tabel tersebut diatas selanjutnya dapat dilihat dibawah ini :

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif disusun mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021. Rencana Program dan Kegiatan dirancang dan dianalisis sesuai potensi dan kebutuhan riil di sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan yang diprediksi masih relevan untuk dilaksanakan lima tahun ke depan. Berdasarkan capaian kinerja yang telah diraih pada tahun – tahun sebelumnya, tugas lima tahun kedepan yang mesti diemban oleh Dinas Pertanian dan Pangan adalah mempertahankan, meningkatkan, mengembangkan dan memperluas capaian – capaian yang telah berhasil diraih tersebut, disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kemampuan SDM untuk menyerapnya. Agar tidak terpaku pada kegiatan – kegiatan yang sudah ada sebelumnya, kegiatan – kegiatan baru/inovasi berupa kegiatan unggulan dan kegiatan terobosan selalu tersaji mengikuti era kekinian, untuk mendukung tugas pokok dan fungsi PD. Peran utama yang merupakan tupoksi Dinas Pertanian dan Pangan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah menjabarkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih yang telah ditetapkan ke dalam sasaran dan indikator sasaran dengan target kinerja sasaran dalam Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang mana dapat diukur ataupun dihitung jumlah maupun persentasenya, seperti tertuang dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Bab IV di depan khususnya pada tabel 4.2. Guna memudahkan pencapaian target kinerja sasaran jangka menengah daerah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama/kunci yang mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia (Permen. PAN) Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU/KPI) Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Pangan 2016 - 2021

Sebagaimana telah disinggung di depan, bahwa setiap PD wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dinas Pertanian dan Pangan telah menetapkan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama untuk mencapai 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan seperti terlihat pada Tabel 6.1. di bawah ini :

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN 2016	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Luas tanam komoditi padi, palawija dan hortikultura		18.500 Ha	19.000 Ha	19.500 Ha	20.000 Ha	20.500 Ha
2	Produktivitas Padi	63,18 kw/ha	63,25 Kw/ha	63,40 Kw/ha	63,60 Kw/ha	63,75 Kw/ha	63,90 Kw/ha
3	Produktivitas Cabai		43,20 Kw/ha	45,2 Kw/ha	47,01 Kw/ha	50,70 Kw/ha	52,40 Kw/ha
4	Produktivitas Kedelai	15,00 kw/ha	15,10 Kw/ha	15,15 Kw/ha	15,18 Kw/ha	15,20 Kw/ha	15,20 Kw/ha
5	Produksi Kopi	641 ton	705 Ton	740 Ton	814 Ton	855 Ton	983 Ton
6	Produksi Kakao	362 ton	398 Ton	414 Ton	430 Ton	447 Ton	465 Ton
7	Jumlah petani/kelompok yang produksi komoditasnya berkualitas industri		13 Klp	17 Klp	21 Klp	24 Klp	27 Klp
8	Jumlah populasi ternak		1.500.000 Ekor	1.510.000 Ekor	1.520.000 Ekor	1.530.000 Ekor	1.540.000 Ekor
9	Jumlah Akseptor IB		6.000 Ekor	6.200 Ekor	6.400 Ekor	6.600 Ekor	6.800 Ekor
10	Jumlah Kasus Penyakit ternak		30.068 Ekor	29.521 Ekor	28.975 Ekor	28.428 Ekor	27.335 Ekor
11	Capain realisasi anggaran Dinas Pertanian dan Pangan		90 %	92 %	93 %	94 %	95 %
12	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan	79,6	80	80,1	80,2	80,3	80,4
13	Jumlah kunjungan yang dilakukan oleh tenaga fungsional	0	5760 kali	5760 kali	5760 kali	5760 kali	5760 kali

Untuk mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja utama yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, tentu sangat memerlukan dukungan dari program dan kegiatan pendukung lainnya seperti : meningkatnya penerapan teknologi pertanian; meningkatnya penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran produk serta meningkatnya jumlah dan pemeliharaan/perbaikan infrastruktur pertanian/perkebunan. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama PD yang telah ditetapkan lewat IKU di atas, tentu saja tidak boleh lepas dari sasaran dan tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana periode 2016 – 2021 yang telah ditetapkan lewat Peraturan Daerah, karena pada dasarnya penyusunan Rencana Strategis PD wajib mengacu kepada RPJMDSB.

BAB VII P E N U T U P

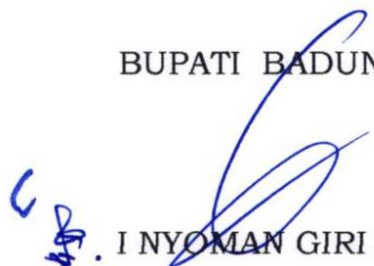
Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung merupakan acuan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran SKPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana ini memuat kebijakan dan program yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas guna mewujudkan Sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan – persoalan pembangunan di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai wujud nyata dari tanggungjawab dan kepedulian pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat tani yang mengedepankan pembangunan pertanian, perkebunan dan peternakan yang berkelanjutan (*sustainable*) dengan melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya .

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung periode 2016-2021, maka tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan secara legitimasi sudah dapat dijadikan pegangan oleh para pemangku kepentingan sebagai landasan penyusunan rencana kerja tahunan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 10 (sepuluh) buah dari 5 (lima) sasaran Renstra yang telah ditetapkan, wajib dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dengan indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan kinerja. Dalam pencapaian sasaran akan terjadi dinamika program dan kegiatan – kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang ingin dicapai yang tentunya tetap mengacu kepada RPJMD Semesta Berencana periode 2016 – 2021.

BUPATI BADUNG,


I NYOMAN GIRI PRASTA

TABEL 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertaniandan Pangan
Kabupaten Badung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Luas tanam komoditi padi, palawija dan hortikultura				ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100%	100%	100%	100%	100%
2	Produktivitas Padi				ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100%	100%	100%	100%	100%
3	Produktivitas Cabai	-	-	-	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100%	100%	100%	100%	100%
4	Produktivitas Kedelai				ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah Produksi Kopi	-	-	-	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah Produksi Kakao				ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100%	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah petani/kelompok yang produksi komoditasnya berkualitas industri				ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah populasi ternak				ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100%	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah Akseptor IB				ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100%	100%	100%	100%	100%
10	Jumlah Kasus penyakit ternak				ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100%	100%	100%	100%	100%
11	Capain realisasi anggaran Dinas Pertaniandan Pangan (%)				ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100%	100%	100%	100%	100%
12	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan				ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100%	100%	100%	100%	100%
13	Jumlah kunjungan yang dilakukan oleh tenaga fungsional				ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100%	100%	100%	100%	100%

**TABEL 2.4. REALISASI BELANJA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 - 2015**

NO	BELANJA	2011			2012			2013			2014			2015		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	15.332.131.869	12.240.781.226	79,84	16.597.672.926	13.856.132.558	83,48	17.184.180.770	16.276.372.340	94,72	19.075.862.184	18.136.377.918	95,08	21.283.358.498	18.735.805.311	88,03
2	Belanja Langsung	5.294.414.720	5.011.425.431	94,65	14.253.678.067	12.899.014.364	90,496	28.748.709.831	24.540.516.384	85,36	36.181.006.225	28.703.602.731	79,33	34.835.261.640	24.271.998.001	69,68
	- Belanja Pegawai	155.426.200	131.621.900	84,68	313.901.200	305.876.400	97,444	540.681.600	537.981.600	99,50	437.060.600	432.020.600	98,85	455.237.200	429.927.400	94,44
	- Belanja Barang dan Jasa	4.101.550.290	3.875.643.371	94,49	9.332.385.942	8.900.844.146	95,376	11.787.193.725	11.027.935.879	93,56	34.437.515.625	27.022.953.724	78,47	32.101.062.300	21.965.365.701	68,43
	- Belanja Modal	1.037.438.230	1.004.160.160	96,79	4.607.390.925	3.692.293.818	80,138	16.420.834.506	12.974.598.905	79,01	1.306.430.000	1.248.628.407	95,58	2.278.962.140	1.876.704.900	82,35
	JUMLAH	20.626.546.589	17.252.206.657		30.851.350.993	26.755.146.922		45.932.890.601	40.816.888.724		55.256.868.409	46.839.980.649	84,77	56.118.620.138	43.007.803.312	

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya peningkatan pemanfaatan lahan pertanian	Meningkatnya luas tanam komoditi pertanian	a Luas tanam komoditi padi, palawija dan hortikultura	18.500 Ha	19.000 Ha	19.500 Ha	20.000 Ha	20.500 Ha
2	Terwujudnya Peningkatan Produksi Pertanian	Meningkatnya Produksi Padi, Palawija, Hortikultura, Kopi dan Kakao	a Produktivitas Padi	63,25 Kw/ha	63,40 Kw/ha	63,60 Kw/ha	63,75 Kw/ha	63,90 Kw/ha
			b Produktivitas Cabai	43,20 Kw/ha	45,2 Kw/ha	47,01 Kw/ha	50,70 Kw/ha	52,40 Kw/ha
			c Produktivitas Kedelai	15,10 Kw/ha	15,15 Kw/ha	15,18 Kw/ha	15,20 Kw/ha	15,20 Kw/ha
			d Produksi Kopi	705 Ton	740 Ton	814 Ton	855 Ton	983 Ton
			e Produksi Kakao	398 Ton	414 Ton	430 Ton	447 Ton	465 Ton
		Meningkatnya Aktivitas Agribisnis	f Jumlah petani/kelompok yang produksi komoditasnya berkualitas industri	13 Klip	17 Klip	21 Klip	24 Klip	27 Klip
		Meningkatnya populasi ternak	g Jumlah populasi ternak	1.500.000 Ekor	1.510.000 Ekor	1.520.000 Ekor	1.530.000 Ekor	1.540.000 Ekor
			h Jumlah Akseptor IB	6.000 Ekor	6.200 Ekor	6.400 Ekor	6.600 Ekor	6.800 Ekor
			i Jumlah Kasus Penyakit ternak	30.068 Ekor	29.521 Ekor	28.975 Ekor	28.428 Ekor	27.335 Ekor
			Meningkatnya pengelolaan perencanaan, pengembangan dan pelayanan yang mendukung sektor Pertanian	a Capain realisasi anggaran Dinas Pertanian dan Pangan	90 %	92 %	93 %	94 %
b Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan	80			80,1	80,2	80,3	80,4	
c Jumlah kunjungan yang dilakukan oleh tenaga fungsional	5760 kali			5760 kali	5760 kali	5760 kali	5760 kali	

Tabel 4.2
Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
Tahun 2016 - 2021

NO	Tujuan			Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya peningkatan pemanfaatan lahan pertanian	Luas tanam komoditi padi, palawija dan hortikultura	23000 Ha	Meningkatnya luas tanam komoditi pertanian	a Luas tanam komoditi padi, palawija dan hortikultura	Memantapkan program intensifikasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna	a Peningkatan Ketahanan Pangan. b Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	
2	Terwujudnya Peningkatan Produksi Pertanian	Jumlah produksi pangan	175.000 ton	Meningkatnya Produksi Padi, Palawija, Hortikultura, Kopi dan Kakao	a Produktivitas Padi	Penerapan Teknologi budidaya tepat guna	a Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) b Program Peningkatan Kesejahteraan Petani c Program peningkatan produksi pertanian/ d Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Pertanian	
					b Produktivitas cabai		a Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	
					c Produktivitas Kedelai		a Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan b Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	
					d Jumlah Produksi Kopi		a Program Peningkatan Kesejahteraan Petani b Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	
					e Jumlah Produksi Kakao		a Program Peningkatan Kesejahteraan Petani b Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	
				Meningkatnya Aktivitas Agribisnis	a Jumlah petani/kelompok yang produksi komoditasnya berkualitas industri	Peningkatan inovasi teknologi, penyediaan sarana prasarana serta penguatan modal dan kelembagaan	a Program Peningkatan Kesejahteraan Petani b Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan c Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) d Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian e Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Pertanian	
				Meningkatnya populasi ternak	a Jumlah populasi ternak	Mengoptimalkan potensi peternakan	a Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian b Program peningkatan produksi pertanian c Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Pertanian d Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) e Program Pengembangan Agribisnis Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	
					b Jumlah akseptor IB		a Program peningkatan produksi pertanian	
					c Jumlah kasus penyakit ternak		a Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak b Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan yang Asuh	

NO	Tujuan			Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3				Meningkatnya pengelolaan perencanaan, pengembangan dan pelayanan yang mendukung sektor Pertanian	a Capain realisasi anggaran Dinas Pertaniandan Pangan (%) b Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan c Jumlah kunjungan yang dilakukan oleh tenaga fungsional	Meningkatkan Kinerja Penyusunan Laporan K Meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah. Peningkatan SDM Aparatur dan Pemenuhan sarana dan prasarana	a Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan b Proqram Penqembangan Sistem Data / Informasi Pertanian c Program Pelayanan Administrasi Perkantoran d Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur e Program Perencanaan dan Penqanqqaran SKPD f Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kineria dan keuangan g Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapangan	

Mangupura,2017
 Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
 Kabupaten Badung

Putu Oka Swadiana, A.Pi.,S.Sos.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19590405 198202 1 012

Tabel 5.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13	14
Terwujudnya peningkatan pemanfaatan lahan pertanian	Meningkatnya luas tanam komoditi pertanian	Luas tanam komoditi padi, palawija dan hortikultura	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	0	84,5	195.680.600	85	573.379.100,00	86	265.406.900,00	87	291.947.590	88	321.142.349,00
			1	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Panoan	Jumlah pengambilan plot ubinan padi, palawija dan hortikultura	750 Plot	92.405.900	750 Plot	92.469.500,00	750 Plot	101.716.450,00	750 Plot	111.888.095	750 Plot	123.076.904,50	
			5	Sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Luas lahan padi yang menjadi target AUTP Padi	1300 Ha	56.585.900	1900 Ha	71.652.600,00	1900 Ha	78.817.860,00	1900 Ha	86.699.646	1900 Ha	95.369.610,60	
			7	Pengelolaan Pertanian Hidroponik	Jumlah Percontohan Hidroponik	1 Unit	46.688.800	1 Unit	77.156.900,00	1 Unit	84.872.590,00	1 Unit	93.359.849	1 Unit	102.695.833,90	
			13	Bintek Pengumpul Data dan Pengolah Data Statistik Tanaman Panoan dan Hortikultura	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Petugas Penoumoulan dan Penoolahan Data Statistik	30 Orang	-	30 Orang	332.100.100,00	-	-	-	-	-		
			11	Program peningkatan produksi pertanian	Jumlah produksi pertanian pertahun	120,972 ton	122.500 ton	329.862.700	125.000 ton	488.076.800,00	127.500 ton	536.884.480,00	130.000 ton	590.572.928	132.500 ton	649.630.220,80
			9	Pembinaan dan Pengadaan Sarana Diversifikasi Tanaman Perkebunan	Jumlah pengadaan tanaman perkebunan : Bib	3010 Pohon	197.616.400	13.000 Pohon	213.115.000,00	13.000 Pohon	234.426.500,00	13.000 Pohon	257.869.150	13.000 Pohon	283.656.065,00	
			20	Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Jumlah kelompok yang melaksanakan kegiatan Kawasan Rumah pangan Lestari (KRPL)	6 Kelompok	132.246.300	6 Kelompok	274.961.800,00	6 Kelompok	302457980	6 Kelompok	332.703.778	6 Kelompok	365974155,8	
Terwujudnya Peningkatan Produksi Pertanian	Meningkatnya Produksi Padi, Palawija, Hortikultura, Kopi dan Kakao	Produktivitas Padi	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	0	84,5	88.407.600	85	80.485.000,00	86	21.606.461.261,00	87	23.517.107.387	88	25.618.818.125,81
			9	Pembinaan dan Lomba Petani, Penyuluh dan Gapoktan Berprestasi	Jumlah Petani, Penyuluh dan gapoktan berprestasi yang akan mengikuti lomba tingkat Provinsi	6 1 petani, 3 penyuluh, 1 BPP dan 1 Gapoktan	64.962.200	6 1 petani, 3 penyuluh, 1 BPP dan 1 Gapoktan	56.862.500,00	6 1 petani, 3 penyuluh, 1 BPP dan 1 Gapoktan	62.548.750,00	6 1 petani, 3 penyuluh, 1 BPP dan 1 Gapoktan	68.803.625	6 1 petani, 3 penyuluh, 1 BPP dan 1 Gapoktan	75.683.987,50	
			2	Rapat Pleno Pekaseh se-Kabupaten Badung	Jumlah peserta Rapat Pleno Pekaseh se Kabupaten Badung	320 Orang	23.445.400	320 Orang	23.622.500,00	320 Orang	25.984.750,00	320 Orang	28.583.225	320 Orang	31.441.547,50	
			xx	Penguatan Kelembagaan Subak	Jumlah Subak yang menjadi lembaga acrobisnis/acroindustri	-	-	-	3 Subak	2.500.000.000,00	2 Subak	2.500.000.000	2 Subak	2.500.000.000,00		
			xx	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Di Kabupaten Badung	Jumlah Jalan usaha tani yang direhabilitasi	0	0	0	7 Paket	19.017.927.761,00	7 Paket	20.919.720.537	7 Paket	23.011.692.590,81		
			15	Pengembangan Optimasi Lahan Sawah	Luas Pengembangan Optimasi Lahan Sawah di Kec. Mengwi, Abiansemal dan Petang	-	5 Subak	209.087.800,00	2 subak	202.517.800,00	-	-	-	-		
			19	Pembangunan Embung	Jumlah Embung yang terbangun	-	2 Unit	327.198.700,00	-	-	-	-	-	-		
			20	Pembangunan Iriqasi Tanah Dalam	Jumlah pompa yang disediakan	-	3 Unit	470.586.199,00	-	-	-	-	-	-		
			8	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah peserta yang meningkat kemampuannya	280 orang	345 orang	84.960.900	345 orang	176.444.620,00	345 orang	11.334.070,00	345 orang	12.467.477	345 orang	13.714.224,70
			1	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Padi	Jumlah Petani yang Mengikuti SLPHT Padi	40 Orang	32.792.800	0	-	0	-	0	-	-		
			5	Pelatihan Teknis Sekehe Manyi	Jumlah peserta pelatihan sekehe manyi	25 Orang	12.657.600	25 Orang	10.303.700,00	25 Orang	11.334.070,00	25 Orang	12.467.477	25 Orang	13.714.224,70	
			8	Pelatihan Metode System of Rice Intensification	Jumlah peserta pelatihan metode System of Rice Intencification (SRI)	30 Orang	39.510.500	-	-	-	-	-	-	-		
			7	Gerakan Pengendalian Orgasme Pengganggu Tanaman (OPT) Padi	Jumlah petani yang mengikuti Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	0	-	100 Orang	166.140.920,00	0	-	0	-	-		
			9	Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) padi dan hortikultura	Jumlah petani yang mengikuti Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	-	-	-	150 orang	172.783.920,00	125 Orang	190.062.312	125 Orang	209.068.543,20		
			11	Program peningkatan produksi pertanian	Jumlah produksi pertanian pertahun	120,972 ton	122.500 ton	2.577.925.840	125.000 ton	1.706.644.200,00	127.500 ton	1.877.308.620,00	130.000 ton	2.065.039.482	132.500 ton	2.271.543.430,20
			1	Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Kios yang mendapat Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	24 Kios	59.962.100	24 Kios	28.560.800,00	24 Kios	31.416.880,00	24 Kios	34.558.568	24 Kios	38.014.424,80	
			6	Pembinaan dan Pengembangan UPJA	Jumlah Kelompok yang di bina	25 kelompok	20.156.200	25 kelompok	168.312.800,00	25 kelompok	185.144.080,00	25 kelompok	203.658.488	25 kelompok	224.024.336,80	
			7	Pembinaan Gudang Pupuk	Jumlah Gudang Pupuk yang dibangun	7 unit	1.257.256.940	7 unit	1.261.487.300,00	7 unit	1.387.636.030,00	7 unit	1.526.399.633	7 unit	1.679.039.596,30	
			12	Pengelolaan Balai Benih Utama (BBU)	Jumlah Benih Padi Bermutu yang disediakan	1.30 Ton	20.986.900	1.30 Ton	21.062.400,00	1.30 Ton	23.168.640,00	1.30 Ton	25.485.504	1.30 Ton	28.034.054,40	
			13	Pengembangan Desa Mandiri Benih	Jumlah Gudang Prosesing Benih	2 Unit	512.189.200	-	-	-	-	-	-	-		
			25	Pengadaan Traktor Roda 2	Jumlah Pengadaan Traktor Roda 2	17 unit	376.520.400	-	-	-	-	-	-	-		
			4	Pengadaan Pestisida Tanaman Pangan	Jumlah Pengadaan Pestisida	2 Paket	330.854.100	1 Paket	180.848.100,00	1 Paket	198.932.910,00	1 Paket	218.826.201	1 Paket	240.708.821,10	
			24	Pembinaan dan pengembangan UPPO	Jumlah Kelompok yang dibina	-	24 kelompok	46.372.800,00	24 kelompok	51.010.080,00	24 kelompok	56.111.088	24 kelompok	61.722.196,80		
			09	Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Pertanian	Jumlah data yang informatif	3 Jenis	5 jenis	61.336.500	5 jenis	387.844.500,00	5 jenis	78.876.930,00	5 jenis	86.764.623	5 jenis	95.441.085,30
			5	Surveilans Pangan di Kabupaten Badung	Tersedia Data Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan di Kabupaten Badung	30 Buku	61.336.500	30 Buku	71.706.300,00	30 Buku	78.876.930,00	30 Buku	86.764.623	30 Buku	95.441.085,30	
			9	Penyusunan Kajian Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Jumlah Dokumen Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dihasilkan	0	-	1 dokumen	316.138.200,00	0	-	0	-	-		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13	14	
		Produktivitas Cabai	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)		84,5	50.106.500	85	-	86	-	87	-	88	-	-
			12	Penyusunan DED Pembangunan Gudang dan Pengadaan Alat Controlled Atmosphere Storage (CAS)	Jumlah konsultansi perencanaan		1 Unit	50.106.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			11	Program peningkatan produksi pertanian	Jumlah produksi pertanian pertahun	120,972 ton	122.500 ton	115.043.600	125.000 ton	2.174.523.800,00	127.500 ton	2.391.976.180,00	130.000 ton	2.631.173.798	132.500 ton	2.894.291.177,80	2.894.291.177,80
			11	Pengembangan Tanaman Hortikultura	Jumlah Pengadaan benih cabe rawit merah			115.043.600	500 sazet	2.174.523.800,00	500 sazet	2.391.976.180,00	500 sazet	2.631.173.798	500 sazet	2.894.291.177,80	2.894.291.177,80
					Jumlah Pengadaan benih cabe besar			-	120 sazet	-	120 sazet	-	120 sazet	-	120 sazet	-	-
					Jumlah Pengadaan benih bawang merah			-	5.000 kg	-	5.000 kg	0	5.000 kg	-	5.000 kg	0	0
					Jumlah budidaya paprika dalam greenhouse			-	2 unit	-	2 unit	0	2 unit	-	2 unit	0	0
					Jumlah budidaya tanaman nenas			-	20.000 pohon	-	20.000 pohon	0	20.000 pohon	-	20.000 pohon	0	0
					Jumlah Pengadaan Bibit Loo Jamur		2.000 Loo	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0
					Jumlah Pengadaan Bibit Jeruk Siem		1.600 Pohon	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0
					Jumlah Pengadaan Bibit Bunga Krisan		2.000 Pohon	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0
		Produktivitas Kedelai	11	Program peningkatan produksi pertanian	Jumlah produksi pertanian pertahun	120,972 ton	122.500 ton	4.738.500	125.000 ton	11.078.500,00	127.500 ton	12.186.350,00	130.000 ton	13.404.985	132.500 ton	14.745.483,50	14.745.483,50
			3	Sosialisasi Benih Padi, Kedelai dan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pupuk dan Benih	8 kali	8 kali	4.738.500	8 kali	11.078.500,00	8 kali	12.186.350,00	8 kali	13.404.985	8 kali	14.745.483,50	14.745.483,50
			16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)		84,5	87.405.500	85	85.891.060,00	86	94.480.166,00	87	103.928.183	87	114.321.000,86	114.321.000,86
			10	Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada Pangan Padi, Jagung dan Kedelai	Jumlah jenis laporan data luas tanam, luas panen, produktivitas padi, jagung dan kedelai	3 jenis laporan	3 jenis laporan	63.237.300	3 jenis laporan	79.854.160,00	3 jenis laporan	87.839.576,00	3 jenis laporan	96.623.534	3 jenis laporan	106.285.886,96	106.285.886,96
			6	Pembinaan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi, Kedelai dan Pelaku Usaha Padi	Jumlah Kelompok Tani yang dibina di Kabupaten Badung	7 Kelompok	7 Kelompok	24.168.200	7 Kelompok	6.036.900,00	7 Kelompok	6.640.590,00	7 Kelompok	7.304.649	7 Kelompok	8.035.113,90	8.035.113,90
		Jumlah Produksi Kopi	8	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah peserta yang meningkat kemampuannya	280 orang	345 orang	86.890.900	345 orang	-	345 orang	-	345 orang	-	345 orang	-	-
			4	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Kopi	Jumlah peserta SLPHT Kopi	50 Orang	50 Orang	86.890.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			11	Program peningkatan produksi pertanian	Jumlah produksi pertanian pertahun	120,972 ton	122.500 ton	128.117.600	125.000 ton	578.143.500,00	127.500 ton	786.981.110,00	130.000 ton	865.679.221	132.500 ton	952.247.143,10	952.247.143,10
			2	Pembibitan Tanaman Perhutanan dan Perkebunan	Jumlah Bibit Tanaman Bibit Perkebunan dan Kebutuhan	10.000 Pohon	10.000 Pohon	128.117.600	10.000 Pohon	312.482.700,00	10.000 Pohon	343.730.970,00	10.000 Pohon	378.104.067	10.000 Pohon	415.914.473,70	415.914.473,70
			22	Pembinaan dan pengadaan sarana Intensifikasi Tanaman Kopi	Jumlah Subak Abian yang dibina dan mendoatkan sarana	0	4 Subak Abian	-	213.705.400,00	4 Subak Abian	213.705.400,00	4 Subak Abian	235.075.940,00	4 Subak Abian	258.583.534	4 Subak Abian	284.441.887,40
			11	Kajian Pemetaan Kawasan Komoditi Perkebunan di kabupaten Badung	Jumlah Dokumen perencanaan	-	-	-	51.955.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			27	Penyusunan kajian idikatif geografis kopi arabika Petang Badung	Jumlah Subak Abian yang dibina dan mendoatkan sarana	-	-	-	-	0	2 Subak Abian	208.174.200,00	2 Subak Abian	228.991.620	2 Subak Abian	251.890.782,00	251.890.782,00
		Jumlah Produksi Kakao	8	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah peserta yang meningkat kemampuannya	280 orang	345 orang	87.306.500	345 orang	-	345 orang	685.168.200,00	345 orang	753.685.020	345 orang	829.053.522,00	829.053.522,00
			2	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Kakao	Jumlah Peserta SLPHT Kakao	50 Orang	50 Orang	87.306.500	0	-	0	-	0	-	0	-	-
			8	Pendampingan Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Perkebunan	Jumlah Kelompok yang mendapatkan pendampingan	-	-	-	-	-	0	685.168.200,00	3 Kelompok	753.685.020	3 Kelompok	829.053.522,00	829.053.522,00
					Jumlah pengadaan sarana produksi : Sensor Tanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah pengadaan sarana produksi : Hand puluer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah pengadaan sarana produksi : Gergaji Dahlan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah pengadaan sarana produksi : Para-bara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah pengadaan sarana produksi : kendaraan roda tiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah pengadaan sarana produksi : Terpal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah pengadaan sarana produksi : Jalan oroduksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			11	Program peningkatan produksi pertanian	Jumlah produksi pertanian pertahun	120,972 ton	122.500 ton	109.534.200	125.000 ton	547.368.700,00	127.500 ton	602.105.570,00	130.000 ton	662.316.127	132.500 ton	728.547.739,70	728.547.739,70
			8	Temu Teknologi Berorientasi Agribisnis Komoditi Perkebunan	Jumlah peserta temu teknologi berorientasi agribisnis komoditi perkebunan	0	0	-	30 Orang	547.368.700,00	30 Orang	602.105.570,00	30 Orang	662.316.127	30 Orang	728.547.739,70	728.547.739,70
			8	Pembinaan dan Pengadaan Sarana Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan Oraanik	Jumlah kelompok yang serangan OPT nya dapat dikendalikan	5 Kelompok	5 Kelompok	109.534.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			9	Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Pertanian	Jumlah data yang informatif	3 Jenis	5 jenis	-	5 jenis	21.267.500,00	5 jenis	23.394.250,00	5 jenis	25.733.675	5 jenis	28.307.042,50	28.307.042,50
			8	Penyusunan data luas areal dan produksi tanaman perkebunan	umlah pengambilan Data Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan	-	4 kecamatan	-	4 kecamatan	21.267.500,00	4 kecamatan	23.394.250,00	4 kecamatan	25.733.675	4 kecamatan	28.307.042,50	28.307.042,50
		Meningkatnya Aktivitas Agribisnis	8	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah peserta yang meningkat kemampuannya	280 orang	345 orang	223.237.100	345 orang	192.063.100,00	345 orang	211.269.410,00	345 orang	232.396.351	345 orang	255.635.986,10	255.635.986,10
		Jumlah petani/kelompok yang produksi komoditasnya berkualitas industri	1	Pelatihan Pemuda Tani	Jumlah Pemuda Tani Peserta Pelatihan	100 Orang	100 Orang	99.981.400	30 Orang	88926500	30 Orang	97819150	30 Orang	107.601.065	55 Gapoktan	118361171,5	118361171,5
			6	Pelatihan Pengelolaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	Terbinanya Pengelola Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	55 Gapoktan	55 Gapoktan	36.219.200	55 Gapoktan	103136600	55 Gapoktan	113450260	55 Gapoktan	124.795.286	55 Gapoktan	137274814,6	137274814,6
			12	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Kelapa	Jumlah Peserta SLPHT Kelapa	50 Orang	50 Orang	87.036.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	0

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13	14
			11	Program peningkatan produksi pertanian	Jumlah produksi pertanian pertahun	120,972 ton	122.500 ton	145.417.250	125.000 ton	201.912.650,00	127.500 ton	222.103.915,00	130.000 ton	244.314.307	132.500 ton	268.745.737,15
			5	Lomba Kelompok Wanita Tani	Jumlah KWT yang mengikuti lomba KWT Tingkat Provinsi	1 kelompok	1 kelompok	32.575.700	1 kelompok	98.571.750,00	1 kelompok	108.428.925,00	1 kelompok	119.271.818	1 kelompok	131.198.999,25
			10	Pembinaan dan Evaluasi Kelembagaan Usaha Tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT) Perkebunan	Jumlah kelompok tani perkebunan yang dibina tingkat Kabupaten	4 Kelompok	4 Kelompok	29.769.400	4 Kelompok	26.412.900,00	4 Kelompok	29.054.190,00	4 Kelompok	31.959.609	4 Kelompok	35.155.569,90
			14	Pembinaan usaha agribisnis dan monev kelompok pengolah hasil peternakan yang di monitoring dan di evaluasi	Jumlah kelompok agribisnis dan pengolah hasil peternakan yang di monitoring dan di evaluasi	20 kelompok	20 kelompok	6.065.300	20 kelompok	5.723.800,00		6.296.180,00		6.925.798		7.618.377,80
			18	Pembinaan dan Lomba Kelompok Petani Ternak	Jumlah kelompok tani ternak yang dibina	9 kelompok	9 kelompok	77.006.850	9 kelompok	71.204.200,00	9 kelompok	78.324.620,00	9 kelompok	86.157.082	9 kelompok	94.772.790,20
			26	Percontohan Budidaya Vanili	Jumlah Subak Abian yang dijadikan percontohan budidaya vanili	-	1 Subak Abian	-	1 Subak Abian	224.714.200,00	1 Subak Abian	224.714.200,00	1 Subak Abian	247.185.620	1 Subak Abian	271.904.182,00
			16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	84,5	125.812.400	85	52.521.100,00	86	57.773.210,00	87	63.550.531	88	69.905.584,10	
			3	Pembinaan Kelompok Pengelola Bantuan Penguatan Modal Usaha Tani	Jumlah kelompok tani sebagai sasaran pembinaan kelompok tani penerima dana penguatan modal usaha tani	24 Kelompok	24 Kelompok	11.072.100	24 Kelompok	12.235.600,00	24 Kelompok	13.459.160,00	24 Kelompok	14.805.076	24 Kelompok	16.285.583,60
			4	Verifikasi Ketahanan Pangan	Jumlah Kelompok Yang Mengikuti Lomba Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi	1 Kelompok	1 Kelompok	35.258.500	1 Kelompok	40.285.500,00	1 Kelompok	44.314.050,00	1 Kelompok	48.745.455	1 Kelompok	53.620.000,50
			11	Studi Penguatan Subak sebagai Lembaga Agribisnis/Acroindustri	Jumlah buku hasil studi penguatan subak menjadi lembaga Agribisnis/Acroindustri	25 buku	25 buku	79.481.800	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	Jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian	15 kali	4 Kali	1.452.180.200	5 kali	1.519.758.860	5 kali	1.671.734.746	5 kali	1.838.908.221	5 kali	2.022.799.043
			1	Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan pameran hasil produksi pertanian/perkebunan di dalam daerah dan luar daerah	3 kali	3 kali	264.784.900	3 Kali	354.348.300,00	3 Kali	389.783.130,00	3 Kali	428.761.443	3 Kali	471.637.587,30
			2	Festival Budaya Pertanian Di Kabupaten Badung	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung	1 kali	1 kali	1.136.566.600	1 Kali	1.151.385.460,00	1 Kali	1.266.524.006,00	1 Kali	1.393.176.407	1 Kali	1.532.494.047,26
			3	Monitoring Harga Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Daging	Jumlah Jenis Komoditi Pertanian yang dimonitoring harganya di tingkat produsen	7 Jenis	7 Jenis	12.714.500	7 Jenis	14.025.100,00	7 Jenis	15.427.610,00	7 Jenis	16.970.371	7 Jenis	18.667.408,10
			5	Pasar Tani	Jumlah Kegiatan Pasar Tani	1 kali	0	38.114.200	0	-	0	-	0	-	0	-
			3	Festival Kopi di Kabupaten Badung	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Festival Kopi di Kabupaten Badung	-	1 Kali	-	1 Kali	469.088.300,00	-	469.088.300,00	-	515.997.130	-	567.596.843,00
			9	Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Pertanian	Jumlah data yang informatif	3 Jenis	5 jenis	64.655.800	5 jenis	41.995.900,00	5 jenis	46.195.490,00	5 jenis	50.815.039	5 jenis	55.896.542,90
			2	Pemeriksaan Residu Pestisida/Bahan Kimia Pada Hortikultura dan Pangan Lainnya	Jumlah Pengujian Sampel Hortikultura dan Pangan	60 sampel	60 sampel	64.655.800	60 sampel	41.995.900,00	60 sampel	46.195.490,00	60 sampel	50.815.039	60 sampel	55.896.542,90
Meningkatnya populasi ternak	Jumlah populasi ternak		10	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	Jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian	15 kali	4 Kali	472.912.000	5 kali	563.484.400,00	5 kali	619.832.840	5 kali	681.816.124	5 kali	749.997.736
				Pengembangan Aneka Ternak dan Ternak Non Konsumsi (Lomba dan Pameran Burung Bupati Badung Cup II)	Jumlah kategori lomba yang dikompetisikan	1 Kali	1 Kali	472.912.000	1 Kali	563.484.400,00	1 Kali	619.832.840,00	1 Kali	681.816.124	1 Kali	749.997.736,40
			11	Program peningkatan produksi pertanian	Jumlah produksi pertanian pertahun	120,972 ton	122.500 ton	6.220.684.419	125.000 ton	4.224.239.900,00	127.500 ton	4.646.663.890,00	130.000 ton	5.111.330.279	132.500 ton	5.622.463.306,90
			15	Pengelolaan UPT RPH Mambal	Terealisasinya operasional pada UPT. RPH Mambal	1 Unit	1 Unit	81.112.400	1 Unit	21.633.000,00	1 Unit	23.796.300,00	1 Unit	26.175.930	1 Unit	28.793.523,00
			16	Pengelolaan sentra peternakan rakyat (SPR)	Terbayarnya upah operasional GPPT Penucur SPR	6 orang	9 orang	32.313.500	9 orang	32.711.500,00	9 orang	35.982.650,00	9 orang	39.580.915	9 orang	43.539.006,50
			17	Pengelolaan sentra ternak sobangan	Jumlah tenaga kerja yang dibayar upahnya pada Sentra Ternak Sobanaan	25 orang	25 orang	753.253.999	25 orang	893.653.200,00	25 orang	983.018.520,00	25 orang	1.081.320.372	25 orang	1.189.452.409,20
			18	Pembinaan dan Lomba Kelompok Petani Ternak	Jumlah kelompok tani ternak yang dibina	9 kelompok	9 kelompok	77.006.850	9 kelompok	71.204.200,00	9 kelompok	78.324.620,00	9 kelompok	86.157.082	9 kelompok	94.772.790,20
			19	Pengadaan Sarana Sentra Ternak Sobangan	Terlaksananya Pengadaan: Makanan Ternak	2.727.280 kg	2.727.280 kg	2.797.277.900	2.727.280 kg	3.205.038.000,00	2.727.280 kg	3.525.541.800,00	2.727.280 kg	3.878.095.980	2.727.280 kg	4.265.905.578,00
				Pengadaan Bibit ternak	Jumlah bibit ternak yang diadakan	1303 ekor	0	2.493.719.770	0	-	0	-	0	-	0	-
			9	Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Pertanian	Jumlah data yang informatif	3 Jenis	5 jenis	317.599.900	5 jenis	177.572.320,00	5 jenis	195.329.552,00	5 jenis	214.862.507	5 jenis	236.348.757,92
			4	Pelaksanaan cacah jiwa ternak	Jumlah non ternak sapi yang terdapat Jumlah ternak sapi yang memiliki kartu ternak	1456098 ekor 30.771 ekor	0	132.616.200	1456098 ekor 30.771 ekor	177.572.320,00	0	195.329.552,00	0	214.862.507	0	236.348.757,92
			6	pemetaan potensi peternakan	Terealisasinya penyusunan dokumen pemetaan potensi peternakan	1 paket	0	184.983.700	-	-	0	-	-	-	0	-
			16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	84,5	1.133.963.200	85	2.690.402.900,00	86	2.959.443.190,00	87	3.255.387.509	88	3.580.926.259,90	
			8	Pembinaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Petani Mandiri Sejahtera (TANIMAS)	Jumlah Gapoktan yang menerapkan teknologi tenat auna	12 Gapoktan	15 gapoktan	1.133.963.200	15 gapoktan	2.690.402.900	15 gapoktan	2.959.443.190,00	15 gapoktan	3.255.387.509	15 gapoktan	3.580.926.259,90
			15	Program Pengembangan Agribisnis	Jumlah petani/kelompok yang produksi komoditasnya berorientasi pasar	13 Kelompok	17 Kelompok	-	17 Kelompok	7.960.847.200,00	21 Kelompok	8.756.931.920,00	24 Kelompok	9.632.625.112	27 Kelompok	10.595.887.623,20
			1	Pengembangan Agribisnis Ayam Ras Petelur	Jumlah pengembangan agribisnis ayam ras petelur : obat obatan	-	-	-	43 paket, pakan ayam layer 425.700 kg, bibit ayam layer 64.500 ekor	7.960.847.200	-	8.756.931.920,00	-	9.632.625.112	-	10.595.887.623,20
			14	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah kelompok yang meningkat pengetahuan dan keterampilan peternak dalam menerapkan teknologi peternakan tenat auna	5 Kelompok	5 Kelompok	-	5 Kelompok	59.529.610	5 Kelompok	65.482.571,00	5 Kelompok	72.030.828	5 Kelompok	79.233.910,91
			1	Bimtek pengolahan pakan untuk mendukung pelaksanaan UPSUS SIWAB (upaya khusus Sapi Indukan Wajib Bunting)	Jumlah kelompok yang mendapat bimbingan teknis	5 Kelompok	0	-	5 Kelompok	59.529.610	5 Kelompok	65.482.571,00	5 Kelompok	72.030.828	5 Kelompok	79.233.910,91

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19965000				25 Jagat 26 Penyediaan Jasa Penjualan Lelang Pengelolaan Kebersihan Kantor 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Anasatur 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 7 Pengadaan perlengkapan kantor 9 Pengadaan peralatan kantor 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 26 Pemeliharaan perlengkapan kantor 28 Pemeliharaan peralatan kantor 73 Pembuatan Taman Inner Plaza Gedung Unit 11 pada Pusat	Jumlah jasa transportasi dan akomodasi Jumlah penunjam lelang yang tersedia Jumlah tenaga kerja non pegawai Tersedianya sarana dan prasarana anasatur yang memadai 60 Bulan 1 Paket 1.826.911.550 22 unit 407.000.000 1 Paket 371.025.200 1 Paket 488.000.000 1 Paket 26.000.000 Jumlah taman kantor yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas yang terawat Jumlah perlengkapan Kantor (AC) yang Jumlah Sifa yang diservice Jumlah Korden yang dipelihara Jumlah peralatan kantor yang terpelihara Cakupan Taman Innerplaza gedung Unit 11	1 LS 32 Paket 48.000.000 225.568.000 6 Orang 1 Paket 1.826.911.550 22 unit 407.000.000 1 Paket 371.025.200 1 Paket 488.000.000 1 Paket 26.000.000 124 Unit 186.413.500 94 unit 102.500.000 1 set 0 1 paket 0 171 unit 46.001.650 199.971.200 0	1 LS 10 Paket 15.000.000,0 10 Paket 0 1 Paket 1.577.276.650,00 1 Paket 219.600.000,0 1 Paket 805.500.000,0 10 Paket 70.000.000,0 1 Paket 0 32 unit 38.000.000,0 0 1 paket 0 200 Unit 107.176.650,00 0	1 LS 10 Paket 15.000.000,0 10 Paket 0 1 Paket 1.735.004.315,00 1 Paket 241.560.000,0 1 Paket 886.050.000,0 10 Paket 77.000.000,0 1 Paket 0 159 Unit 370.700.000,0 32 unit 41.800.000,0 0 1 paket 0 200 Unit 117.894.315,00 0	#VALUE! 16.500.000,00 10 Paket 0 1 Paket 1.908.504.747 1 Paket 265.716.000 1 Paket 974.655.000 10 Paket 84.700.000 1 Paket 0 159 Unit 407.770.000 32 unit 45.980.000 0 1 paket 0 200 Unit 129.683.747 0	#VALUE! 18.150.000 10 Paket 0 1 Paket 1.908.504.747 1 Paket 265.716.000 1 Paket 974.655.000 10 Paket 84.700.000 1 Paket 0 159 Unit 407.770.000 32 unit 45.980.000 0 1 paket 0 200 Unit 129.683.747 0	#VALUE! 19.965.000,00 0 0 1 Paket 2.099.355.221,15 0 292.287.600,00 1.072.120.500,00 93.170.000,00 0 448.547.000,00 50.578.000,00 0 142.652.121,15 0 0 0						
				07 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Peranekat Daerah Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan yang Tersusun : - Renja - RKA - Renstra	3 Jenis 15 buku 15 buku 10.988.800 15 buku 15 buku #VALUE! 15 buku 15 buku 0 0	3 Jenis 10.988.800 #VALUE! #VALUE! 0 0	2 Jenis 8.160.400,00 8.160.400,00 #VALUE! 0 0	2 Jenis 8.976.440,00 8.976.440,00 0 0 0	2 Jenis 9.874.084 9.874.084 15 buku 15 buku 15 buku 0 0	2 Jenis 9.874.084 9.874.084 15 buku 15 buku 15 buku 0 0	3 Jenis 10.861.492,40 10.861.492,40 0 0 0 0 0					
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan	06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 05 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pengelolaan keuangan kegiatan SKPD dapat dilaksanakan dengan lancar dan bertanggung jawab Jumlah jenis dokumen yang tersedia : LKJIP RKT IKU PK	60 Bulan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	12 Bulan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	5.208.450 5.208.450 #VALUE! #VALUE! 0	12 Bulan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	12 Bulan 5.692.100,00 5.692.100,00 #VALUE! #VALUE! 0	12 Bulan 6.261.310,00 6.261.310,00 0 0 0	12 Bulan 6.261.310,00 6.261.310,00 0 0 0	12 Bulan 6.887.441 6.887.441 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	12 Bulan 6.887.441 6.887.441 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	12 Bulan 7.576.185,10 7.576.185,10 0 0 0 0			
				09 Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Pertanian 11 Kajian Pemetaan Kawasan Komoditi Perkebunan di 4 Studi kesesuaian lahan untuk pengembangan komoditas unggulan di Kabupaten Badung 1 Survey penyerapan produk pertanian untuk pariwisata di Kabupaten Badung	Jumlah data yang informatif Jumlah Dokumen perencanaan Jumlah pemetaan hasil analisis kesesuaian lahan untuk pengembangan komoditas unggulan di Kab. Badung Tersedianya buku hasil survey penyerapan produk pertanian di Kab. Badung	3 Jenis 25 buku 78.498.400 25 buku 82.311.200 0	5 jenis 5 APBD Perubahan 51.955.400,00 0	5 jenis 51.955.400,00 51.955.400,00 0 0	5 jenis 40.004.700,0000 40.004.700,0000 0 0	5 jenis 44.005.170 44.005.170 25 buku 44.005.170 25 buku	5 jenis 44.005.170 44.005.170 25 buku 44.005.170 25 buku	5 jenis 48.405.687,0000 48.405.687,0000 0 0 0					
		Jumlah kunjungan yang dilakukan oleh tenaga fungsional	12 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan 01 Pengelolaan BPP Mengwi 02 Pengelolaan BPP Abiansemal 03 Pengelolaan BPP Petang 04 Pengelolaan BPP Kuta Utara 05 Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh 06 Penilaian Angka Kredit bagi Pegawai Fungsional 07 Pengelolaan BPP Mumbul 08 Bimbingan Teknis Penyuluh Lapangan 03 Pembangunan Percontohan pada Lahan BPP Petang 04	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan Luas lahan percontohan tanaman tanaman padi Luas lahan percontohan tanaman jambu kristal Luas lahan percontohan tanaman palawija Luas lahan percontohan tanaman kopi yang dipelihara secara intensif Luas lahan percontohan tanaman jambu kristal yang dipelihara secara intensif Jumlah percontohan hidroponik Jumlah Penyuluh yang terpenuhi biaya operasionalnya Jumlah pegawai fungsional Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Badung yang mendapat penilaian angka kredit Luas lahan percontohan tanaman jeruk, buah naqa dan siliq Jumlah peserta Bimtek Penyuluh Lapangan Jumlah demplot percontohan paprika	43 are 43 are 40 are 40 are 40 are 43 are 43 are 25 are 25 are 1 unit 50 Orang 50 Orang 50 Orang 93 Are 50 Orang 0	43 are 40 are 40 are 40 are 43 are 43 are 25 are 25 are 1 unit 50 Orang 50 Orang 50 Orang 93 Are 50 Orang 0	26.259.850 16.711.450 0 306.490.100 295.120.900 148.835.400 2.010.500 27.270.750 489.676.500 0	43 Are 40 are 40 Are 43 are 43 are 25 are 25 are 1 unit 52 Orang 44 Orang 93 Are 51 Orang 1 unit	30.315.550,00 18.660.300,00 0 107.427.620,00 28.076.290,00 583.369.000,00 2.221.500,00 304.680.950,00 508.117.100,00 500.000.000,00	43 Are 40 are 40 Are 43 are 43 are 25 are 25 are 1 unit 40 Orang 40 Orang 40 Orang 93 Are 45 Orang 0	33.347.105,00 20.526.330,00 0 107.427.620,00 30.883.919,00 641.705.900,00 2.443.650,00 335.149.045,00 558.928.810,00 #VALUE!	43 Are 40 are 40 Are 43 are 43 are 25 are 25 are 1 unit 40 Orang 40 Orang 40 Orang 93 Are 45 Orang 0	36.681.816 22.578.963 0 306.490.100 33.972.311 705.876.490 2.688.015 368.663.950 614.821.691 #VALUE!	43 Are 40 are 40 Are 43 are 43 are 25 are 25 are 1 unit 40 Orang 40 Orang 40 Orang 93 Are 45 Orang 0	40.349.997,05 24.836.859,30 0 0 0 0 0 37.369.541,99 776.464.139,00 2.956.816,50 405.530.344,45 676.303.860,10 #VALUE! 0 0		

Tabel 5.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			Target	Rp. Jutaan		
4	5	6	7	8	9	
1 2	01	URUSAN WAJIB URUSAN PILIHAN URUSAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN		41.512,58		
	01	Program pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan :	Jumlah pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	2.645,72	Distanbunhut
		02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air, dan listrik yang dipakai	22 rekening	180,00	Distanbunhut
		06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disamsat dan di-KIR	12 bulan	60,19	Distanbunhut
		07. Pelayanan jasa administrasi keuangan	Tersedianya materi 3000, materai 6000, dan buku cek	12 bulan	6,02	Distanbunhut
		08. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kerja non pegawai	27 orang	688,50	Distanbunhut
		10. Penyediaan alat tulis kantor	Kebutuhan alat tulis yang tersedia	12 bulan	48,00	Distanbunhut
		11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan blanko-blanko untuk administrasi kantor yang tersedia	12 bulan	30,99	Distanbunhut
		12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan elektronik yang tersedia	12 bulan	14,50	Distanbunhut
		14. Penyediaan peralatan rumah tangga	Kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	12 bulan	9,79	Distanbunhut
		15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (Surat Kabar/ Majalah) yang tersedia	12 bulan	81,15	Distanbunhut
		17. Penyediaan makanan dan minuman	- Jumlah minuman harian pegawai yang tersedia - Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia (Snack, Kopi, Gula, Teh)	12 bulan	23,30	Distanbunhut
		18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	187,50	Distanbunhut
		19. Penyediaan dekorasi	Kebutuhan dekorasi pada hari-hari tertentu tersedia	12 bulan	7,12	Distanbunhut
		20. Penyediaan bahan bakar kendaraan	BBM Non Subsidi dan Non Subsidi (Solar) tersedia	12 bulan	808,01	Distanbunhut
		21. Penyediaan upacara keagamaan	Kebutuhan sarana upacara keagamaan yang tersedia	12 bulan	278,57	Distanbunhut
		22. Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai honorer dan THL yang dibayar honorariumnya	12 bulan	153,59	Distanbunhut
		23. Lomba-lomba Olahraga/Kesenian	- Jumlah makanan dan	12 bulan	15,00	Distanbunhut

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
			Target	Rp. Jutaan				
			4	5		6	7	8
	Pada Hari-hari Bersejarah	minuman untuk menunjang kegiatan lomba (Snack, Nasi, Air mineral) - Jumlah pakaian lomba yang tersedia						
	24. Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat	- Jumlah aci-aci penganyaran yang tersedia - Jumlah jasa transportasi dan akomodasi untuk penganyaran yang tersedia	12 bulan	40,00	Distanbunhut			
	25. Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Jumlah pengumuman lelang yang tersedia	12 bulan	13,50	Distanbunhut			
	02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	1.186,29	Distanbunhut			
	05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	- Kendaraan dinas/ operasional yang tersedia - Sepeda motor non matic	12 bulan	300,00	Distanbunhut			
	07. Pengadaan perlengkapan kantor	Perlengkapan gedung kantor yang tersedia (17 jenis)	12 bulan	566,74	Distanbunhut			
	22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	12 bulan	5,00	Distanbunhut			
	24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kebutuhan perawatan kendaraan dinas/ operasional dengan baik	12 bulan	216,55	Distanbunhut			
	26. Pemeliharaan perlengkapan kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor (AC)	12 bulan	42,00	Distanbunhut			
	28. Pemeliharaan peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	12 bulan	46,00	Distanbunhut			
	68. Pemeliharaan Website	Terpeliharanya website	12 bulan	10,00	Distanbunhut			
	06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan aparatur	Jumlah capaian kinerja dan keuangan SKPD	12 bulan	216,83	Distanbunhut			
	01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD	12 bulan	206,10	Distanbunhut			
	05. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah jenis dokumen yang tersedia (LAKIP, RKT, IKU, PK)	12 bulan	5,62	Distanbunhut			
	06. Survey Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat	12 bulan	5,12	Distanbunhut			
	26 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun	3 jenis	7,69	Distanbunhut			
	01. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA dan Renstra)	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun	45 buku	7,69	Distanbunhut			
	15 Program rehabilitasi hutan dan lahan	Jumlah kelompok penghijauan	22 kelompok	109,58	Distanbunhut			
	Kegiatan :							
	02. Pembinaan Kelompok Tani Dalam Rangka Rehabilitasi Hutan dan	Jumlah kelompok tani yang dibina untuk rehabilitasi hutan	6 kelompok	4,62	Distanbunhut			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
			Target	Rp. Jutaan				
			4	5		6	7	8
	Lahan di Kecamatan Petang dan Kuta Selatan	dan lahan di Kec. Petang dan Kuta Selatan						
	03. Lomba Penghijauan	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH), Kelompok Pecinta ALam (KPA), Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) dan Kader Konservasi Alam (KKA) yang dibina dalam Lomba Penghijauan	16 kelompok	104,96	Distanbunhut			
	17 Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Kegiatan :	Luas hutan yang masyarakatnya perlu dibina	1.779,87 Ha	5,11	Distanbunhut			
	01. Pembinaan, Pengawasan Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan	Luas kawasan hutan yang masyarakatnya perlu mendapat pembinaan pengawasan dan pengamanan	1.779,87 Ha	5,11	Distanbunhut			
	19 Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan Kegiatan :	Jumlah desa yang dibina	10 desa	4,09	Distanbunhut			
	01. Pembinaan, Monitoring dan Peredaran Hasil Hutan	Jumlah desa yang tertib administrasi untuk peredaran hasil hutannya	10 desa	4,09	Distanbunhut			
	15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian/Perkebunan)	Indeks Pertanaman (IP)	17275 Ha 1,726	26.967,17	Distanbunhut			
	01. Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	Jumlah pengambilan plot ubinan padi, palawija, dan hortikultura	750 plot	83,39	Distanbunhut			
	02. Rapat Pleno Pekaseh Se-Kabupaten Badung	Jumlah Rapat Pleno Pekaseh Se-Kabupaten Badung	320 orang	20,97	Distanbunhut			
	03. Pembinaan Kelompok Pengelola Bantuan Penguatan Modal Usaha Tani	Jumlah kelompok tani sebagai sasaran pembinaan kelompok tani penerima dana penguatan modal usaha tani	24 kelompok	7,08	Distanbunhut			
	04. Pengembangan Optimasi Lahan Sawah	Jumlah pengembangan optimasi lahan sawah di Kec. Mengwi, Abiansemal, dan Petang	450 Ha	1.359,50	Distanbunhut			
	05. Perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kecamatan Abiansemal dan Petang	Panjang saluran irigasi tingkat usaha tani yang diperbaiki	6 km	4.802,21	Distanbunhut			
	06. Perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kecamatan Mengwi dan Kuta Utara	Panjang saluran irigasi tingkat usaha tani yang diperbaiki	6 km	4.801,93	Distanbunhut			
	07. Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Kecamatan Abiansemal dan Petang	Panjang jalan usaha tani yang direhabilitasi	16 km	5.057,58	Distanbunhut			
	08. Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Kecamatan Mengwi	Panjang jalan usaha tani yang direhabilitasi	16 km	5.056,33	Distanbunhut			
	09. Lomba Ketahanan Pangan	Jumlah kelompok yang memperoleh penghargaan ketahanan pangan tingkat kabupaten dan provinsi	5 kelompok	56,57	Distanbunhut			
	12. Lomba Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi dan Kedelai Tingkat Kabupaten	Jumlah kelompok tani yang mengikuti Lomba Peningkatan Mutu Intensifikasi Padi dan	7 kelompok	27,12	Distanbunhut			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
			Target	Rp. Jutaan				
			4	5		6	7	8
		Kedelai						
	14. Pengelolaan Pertanian Hidroponik	Jumlah percontohan hidroponik	1 unit	56,66	Distanbunhut			
	17. Pembinaan dan Lomba Petani, Penyuluh dan Gapoktan Berprestasi	Jumlah petani, penyuluh, dan gapoktan berprestasi yang mengikuti lomba tingkat kabupaten dan provinsi	19 (7 petani, 6 penyuluh, 6 gapoktan)	67,58	Distanbunhut			
	18. Pelatihan Petugas Pengumpul dan Pengolah Data Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah peserta Pelatihan Petugas Pengumpul dan Pengolah Data Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura	30 orang	26,59	Distanbunhut			
	19. Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada Pangan Padi, Jagung dan Kedelai	Jumlah jenis laporan data luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi padi, jagung, dan kedelai	3 jenis laporan	20,97	Distanbunhut			
	21. Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Subak Sebal Ds. Punggul, Subak Mambal Ds. Mambal, Subak Karang Dalem Ds. Bongkasa Pertiwi dan Subak Latu Ds. Abiansemal	Panjang jalan usaha tani yang ditingkatkan kapasitasnya	6,6 km	5.478,95	Distanbunhut			
	22. Pengadaan Pertanian Hidroponik	Jumlah pengadaan pertanian hidroponik	1 unit	43,73	Distanbunhut			
	19 Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Jumlah produksi tanaman pertanian	120972 ton	2.085,60	Distanbunhut			
	Kegiatan :							
	01. Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pesticida	Jumlah kios yang mendapat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	24 kios di 4 kecamatan	28,46	Distanbunhut			
	02. Pembibitan Tanaman Perhutanan dan Perkebunan	Jumlah bibit yang dapat disediakan (bibit tanaman buah-buahan, bibit tanaman upakara, bibit perkebunan dan kehutanan)	12.400 pohon	127,37	Distanbunhut			
	03. Sosialisasi Benih Padi, Kedelai dan Pupuk Bersubsidi	Jumlah kelompok yang menjadi target sosialisasi pupuk dan benih	8 kelompok	4,53	Distanbunhut			
	04. Pengadaan Pesticida Tanaman Pangan	Jumlah pengadaan pestisida	1 paket	151,00	Distanbunhut			
	05. Lomba Kelompok Wanita Tani	Jumlah KWT tanaman pangan dan perkebunan yang mengikuti lomba KWT Tingkat Kab. Badung, Tingkat Prov. Bali, dan verifikasi Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara	12 kelompok	126,12	Distanbunhut			
	07. Pembinaan dan Lomba Kelompok Tani Perkebunan Berprestasi	Jumlah kelompok tani perkebunan berprestasi yang dilombakan	4 kelompok	41,90	Distanbunhut			
	08. Lomba UPJA Berprestasi	Jumlah kelompok yang dinilai dalam Lomba UPJA berprestasi	6 kelompok	16,64	Distanbunhut			
	10. Pembangunan Gudang Pupuk	Jumlah gudang pupuk yang dibangun	6 unit	984,27	Distanbunhut			
	11. Pembinaan dan Pengadaan Sarana Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Jumlah kelompok yang serangan OPT-nya dapat dikendalikan	5 kelompok	144,66	Distanbunhut			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
			Target	Rp. Jutaan				
			4	5		6	7	8
	Perkebunan Organik							
	12. Pembinaan dan Pengadaan Sarana Diversifikasi Tanaman Perkebunan	Jumlah tanaman perkebunan yang meningkat produksinya (Kelapa genjah)	6000 pohon	91,63	Distanbunhut			
	14. Pengembangan Tanaman Hortikultura	Jumlah luas yang membudidayakan jamur dan bawang merah	45 meter2 5 Ha	173,01	Distanbunhut			
	16. Pembinaan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Jumlah kelompok yang melaksanakan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	16 kelompok	6,18	Distanbunhut			
	17. Pengadaan Alat Mesin Pertanian	Jumlah pengadaan alat Power Thereser	10 unit	189,82	Distanbunhut			
	20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	52 orang	6.608,73	Distanbunhut			
	01. Peningkatan Pengelolaan BPP Mengwi	Luas lahan percontohan tanaman padi	43 are	30,41	Distanbunhut			
	02. Peningkatan Pengelolaan BPP Abiansemal	Luas lahan percontohan tanaman jambu kristal, ubi kayu, dan jagung hibrida	40 are	19,12	Distanbunhut			
	03. Peningkatan Pengelolaan BPP Petang	Luas lahan percontohan tanaman kopi dan jambu kristal yang dipelihara secara intensif	68 are	26,95	Distanbunhut			
	04. Peningkatan Pengelolaan BPP Kuta Utara	Jumlah gedung dan taman terpelihara	1 unit	5,84	Distanbunhut			
	05. Peningkatan Kapasitas Penyuluh	Jumlah penyuluh yang terpenuhi biaya operasionalnya	50 orang	74,88	Distanbunhut			
	06. Penilaian Angka Kredit bagi Pegawai Fungsional	Jumlah pegawai fungsional pada Distanbunhut Kab. Badung yang mendapat penilaian angka kredit	50 orang	2,32	Distanbunhut			
	07. Peningkatan Pengelolaan Balai Benih Utama (BBU)	Jumlah benih padi bermutu yang disediakan	1260 kg	19,90	Distanbunhut			
	08. Peningkatan Pengelolaan BPP Mumbul	Luas lahan percontohan tanaman jeruk dan buah naga	93 are	20,22	Distanbunhut			
	10. Pengadaan Sarana dan Prasarana BPP se-Kabupaten Badung	Jumlah BPP yang sarana penunjang kinerja dapat dipenuhi	5 bpp	6.409,10	Distanbunhut			
	27 Program Pengembangan Agribisnis	Jumlah komoditi yang dibina	5 komoditi	18,21	Distanbunhut			
	02. Pelatihan Manajemen Usaha Agribisnis	Jumlah peserta pelatihan	45 orang	13,82	Distanbunhut			
	03. Temu Usaha Komoditas Tanaman Pangan dan Perkebunan	Jumlah kemitraan yang terjalin untuk komoditi tanaman pangan dan perkebunan	5 komoditi	4,39	Distanbunhut			
	28 Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	Jumlah pengujian sampel hortikultura	40 sampel	199,54	Distanbunhut			
	02. Surveilans Pangan di Kabupaten Badung	Tersedianya data pola pangan harapan ketersediaan pangan di Kab. Badung	30 buku	55,06	Distanbunhut			
	03. Pemeriksaan Residu Pestisida	Jumlah pengujian sampel	40 sampel	28,08	Distanbunhut			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
			Target	Rp. Jutaan				
			4	5		6	7	8
	pada Hortikultura	hortikultura						
	04. Penyusunan Profil Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	Buku profil	60 buah	4,48	Distanbunhut			
	05 Penyusunan Naskah Akademis Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah dokumen naskah akademis perlindungan dan pemberdayaan petani	1 jenis dokumen	51,12	Distanbunhut			
	06 Studi Kesesuaian Lahan untuk Pengembangan Komoditas Unggulan di Kabupaten Badung	Jumlah pemetaan hasil analisa kesesuaian lahan untuk pengembangan komoditas	25 buku	60,80	Distanbunhut			
	17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah promosi produk pertanian	15 kali	1.267,94	Distanbunhut			
	Kegiatan :							
	01. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan pameran hasil produksi pertanian/perkebunan di dalam daerah dan luar daerah	3 kali	260,45	Distanbunhut			
	02. Festival Budaya Pertanian Di Kabupaten Badung	Jumlah pelaksanaan Festival Budaya Pertanian Di Kabupaten Badung	1 kali	988,26	Distanbunhut			
	03. Monitoring Harga Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura ditingkat Pasar	Terlaksananya monitoring 24 jenis harga komoditi tanaman pangan dan hortikultura	3 pasar	19,22	Distanbunhut			
	15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah peserta pelatihan pertanian	130 orang	190,09	Distanbunhut			
	Kegiatan :							
	02. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Kakao	Jumlah peserta SLPHT Kakao	50 orang	66,55	Distanbunhut			
	03. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Kelapa	Jumlah peserta SLPHT Kelapa	50 orang	53,00	Distanbunhut			
	04. Pelatihan Pemuda Tani	Jumlah pemuda tani peserta pelatihan	30 orang	70,53	Distanbunhut			

Tabel 5.3
Indikasi Rencana Program Strategis Pembangunan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				24.920,70		41.905,27		56.370,53		61.324,25		67.248,85		251.769,60	
03	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.681,38		4.515,35		26.474,82		28.649,53		31.264,49		92.585,56	
16	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)		84.500	1.681,38	85,00	4.515,35	86,00	26.474,82	87,00	28.649,53	88,00	31.264,49	88,00	92.585,56	Diperpa
1	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	Jumlah pengambilan plot ubinan padi, palawija dan hortikultura		750 Plot	92,41	750 Plot	92,47	750 Plot	101,72	750 Plot	111,89	750 Plot	123,08	3750 Plot	521,56	
2	Rapat Pleno Pekaseh se-Kabupaten Badung	Jumlah peserta Rapat Pleno Pekaseh se Kabupaten Badung		320 Orang	23,45	320 Orang	23,62	320 Orang	25,98	320 Orang	28,58	320 Orang	31,44	1600 Orang	133,08	
3	Pembinaan Kelompok Pengelola Bantuan Penguatan Modal Usaha Tani	Jumlah kelompok tani sebagai sasaran pembinaan kelompok tani penerima dana penunjang modal usaha tani		24 kelompok	11,07	24 kelompok	23,04	24 kelompok	25,34	24 kelompok	27,87	24 kelompok	30,66	120 kelompok	117,98	
4	Verifikasi Ketahanan Pangan	Jumlah kelompok yang mengikuti lomba ketahanan pangan tingkat Provinsi		1 kelompok	35,26	1 kelompok	40,29	1 kelompok	44,31	1 kelompok	48,75	1 kelompok	53,62	5 kelompok	222,22	
5	Sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Luas lahan padi yang menjadi target AUTP		1900 Ha	56,59	1900 Ha	86,65	0	-	0	-	0	-	0	143,24	
xx	Sosialisasi Asuransi Usaha Tani (AUTP) dan Asuransi Ternak Sani (AUTS)	Luas lahan padi yang menjadi target AUTP dan Asuransi Ternak Sani yang menjadi target						3000 Ha	135,07	3000 Ha	148,57	3000 Ha	163,43	3000 Ha	447,07	
6	Pembinaan Peningkatan Mutu Intensifikasi Kedelai dan Petaku Usaha Padi	Jumlah kelompok tani yg dibina di Kabupaten Badung		7 kelompok	24,17	7 kelompok	6,04	7 kelompok	6,64	7 kelompok	7,30	7 kelompok	8,04	35 kelompok	52,19	
7	Pengelolaan Pertanian Hidroponik	Jumlah percontohan hidroponik		1 unit	46,69	1 unit	77,16	1 unit	150,04	1 unit	165,05	1 unit	181,55	5 unit	620,49	
8	Pembinaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Petani Mandiri Selahtera (Tanimas)	Jumlah gapoktan yang menerapkan teknologi tepat guna		414	12 Gapoktan	-	15 Gapoktan	-	18 Gapoktan	-	21 Gapoktan	-	24 Gapoktan	-	24 Gapoktan	
9	Pembinaan dan Lomba Petani, Penyuluh dan Gapoktan Berprestasi	Jumlah Penerimaan Ternak dan Gapoktan Berprestasi		139 ekor	1.133,96	139 ekor	2.690,40	138 ekor	2.959,44	138 ekor	3.255,39	138 ekor	3.580,93	692 ekor	13.620,12	
10	Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada Pangan Padi, Jagung dan Kedelai	Jumlah jenis laporan data luas tanam, luas panen, produktivitas padi, jagung dan kedelai		3 jenis laporan	63,24	3 jenis laporan	79,85	3 jenis laporan	87,84	3 jenis laporan	96,62	3 jenis laporan	106,29	3 jenis laporan	433,84	
11	Studi penguatan subak sebagai lembaga pertanian/agroindustri	Tercapainya Target Sasaran Tanam Panen, Produktivitas dan Produksi Padi		3 jenis laporan	-	3 jenis laporan	-	3 jenis laporan	-	3 jenis laporan	-	3 jenis laporan	-	3 jenis laporan	-	
12	Penyusunan DED pembangunan gudang dan pengadaan alat controlled atmosphere storage (CAS)	Jumlah buku		25 buku	79,48									25 buku	79,48	
13	Bintek Pengumpul Data dan Pengolah Data Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Petugas Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik tanaman Pangan dan Hortikultura		1 paket	50,11									1 paket	50,11	
15	Pengembangan Optimasi Lahan Sawah	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Petugas Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik tanaman Pangan dan Hortikultura		30 Orang	-	30 Orang	332,10							30 Orang	332,10	
19	Pembangunan Embung	Luas Pengembangan Optimasi Lahan Sawah di Kec. Mengwi, Abiansemal dan Petang			-	5 Subak	209,09	2 subak	202,52					7 Subak	411,61	
20	Pembangunan Irigasi Tanah Dalam	Jumlah Embung yang terbangun			-	2 Unit	327,20							2 Unit	327,20	
xx	Pembinaan, Lomba dan Pengadaan Sarana Penguatan Pengembangan Pertanian Terintegrasi (Simantri)	Jumlah pompa yang disediakan			-	3 Unit	470,59	53 Gapoktan	1157,980	53 Gapoktan	1.273,78	53 Gapoktan	1.401,16	53 Gapoktan	3.832,92	
xx	Penguatan Kelembagaan Subak	Jumlah Subak yang menjadi lembaga pertanian/agroindustri						3 Subak	2.500	2 Subak	2.500,00	2 Subak	2.500,00	7 Subak	7.500,00	
xx	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Di Kabupaten Badung	Jumlah Jalan usaha tani yang direhabilitasi		0	0	0	0	7 Paket	19.017,93	7 Paket	20.919,72	7 Paket	23.011,69	21 Paket	62.949,34	
203	URUSAN PILIHAN URUSAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				23.239,33		37.389,92		29.895,71		32.674,72		35.984,37		159.184,03	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	60 bulan	12 bulan	3.929,52	12 bulan	4.710,74	12 bulan	5.165,32	12 bulan	5.681,85	12 bulan	6.250,03	60 bulan	25.737,45	DIPERPA
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air, listrik dan internet yang dinikmati		38 Rekening	638,38	42 Rekening	734,5	42 Rekening	807,94	42 Rekening	888,73	42 Rekening	977,61	42 Rekening	4.047,15	
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disamsat dan di-KIR		140 unit	51,49	159 kendaraan	56,2	159 kendaraan	61,85	159 kendaraan	68,04	159 kendaraan	74,84	159 kendaraan	312,45	
07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya materai 3000		750 lembar	6,02	290 lembar	11,5	290 lembar	12,62	290 lembar	13,88	290 lembar	15,27	1910 Lembar	59,25	
		Tersedianya materai 6000		280 lembar		1.350 lembar		1.350 lembar		1.350 lembar		1.350 lembar		5680 Lembar	-	
		Tersedianya buku cek		15 buku		50 buku		50 buku		50 buku		50 buku		215 Buku	-	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kerja non pegawai		31 orang	881,27	36 Orang	1.183,0	36 Orang	1.301,34	36 Orang	1.431,47	36 Orang	1.574,62	36 Orang	6.371,72	
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kebutuhan Alat Tulis Kantor yang tersedia		12 Bulan	66,64	12 Bulan	77,5	12 Bulan	85,30	12 Bulan	93,83	12 Bulan	103,22	60 Bulan	426,54	
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan blanko-blanku untuk administrasi kantor yang tersedia		12 Bulan	43,37	12 Bulan	63,1	12 Bulan	69,36	12 Bulan	76,29	12 Bulan	83,92	60 Bulan	336,00	
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Kebutuhan alat listrik dan elektronik yang tersedia		4 Paket	34,10	14 paket	23,0	14 paket	25,30	14 paket	27,83	14 paket	30,61	14 paket	140,84	
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia		12 Bulan	21,05	12 Bulan	50,0	12 Bulan	54,99	12 Bulan	60,49	12 Bulan	66,54	12 Bulan	253,05	
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (Surat Kabar/Majalah) yang tersedia		1.404 exp/bulan	168,49	1.548 exp/bln	195,5	1.548 exp/bln	215,00	1.548 exp/bln	236,50	1.548 exp/bln	260,15	7595 exp/bln	1.075,60	
17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah minuman harian pegawai yang tersedia Jumlah snack tamu yang tersedia Jumlah kopi tamu yang tersedia Jumlah gula untuk tamu yang tersedia Jumlah teh tamu yang tersedia Jumlah minuman harian tamu yang tersedia : air minum dalam kemasan Jumlah minuman harian tamu yang tersedia : air minum dalam kemasan (galon)		864 galon	22,64	864 galon	22,6	-	24,91	-	27,40	-	30,14	1728 Galon	127,73	
				500 Kotak		500 Kotak		500 Kotak	-	500 Kotak	-	500 Kotak	-	2500 Kotak	-	
				12 kg		12 kg		12 kg	-	12 kg	-	12 kg	-	60 kg	-	
				14 kg		24 kg		24 kg	-	24 kg	-	24 kg	-	110 kg	-	
				12 kg		12 Kotak		12 Kotak	-	12 Kotak	-	12 Kotak	-	60 Kotak	-	
								264 dus		264 dus		264 dus		792 dus		
								120 galon		120 galon		120 galon		360 galon		
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1 LS	287,50	1 LS	400,0	1 LS	440,00	1 LS	484,00	1 LS	532,40	5 LS	2.143,90	
19	Penyediaan dekorasi	Kebutuhan dekorasi pada hari-hari tertentu yang tersedia		12 Bulan	19,53	12 Bulan	20,7	12 Bulan	22,76	12 Bulan	25,03	12 Bulan	27,54	60 Bulan	115,54	
20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	BBM Non Subsidi tersedia BBM Non Subsidi (Solar) tersedia		63.560 Liter 4.741 Liter	763,64	88.140 liter 4.800 liter	1.034,8	69540 Liter 4656 Liter	1.138,30	69540 Liter 4656 Liter	1.252,13	69540 Liter 4656 Liter	1.377,35	360.320 Liter 23.509 Liter	5.566,24	
21	Penyediaan upacara keagamaan	Kebutuhan sarana upacara keagamaan yang tersedia		12 Bulan	455,94	12 Bulan	491,9	12 Bulan	541,08	12 Bulan	595,19	12 Bulan	654,71	60 Bulan	2.738,83	
22	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai honorer dan THL yang dihavar honorariumnya		3 Orang	140,90	2 orang	152,9	2 orang	168,22	2 orang	185,04	2 orang	203,55	2 orang	850,63	
23	Lomba olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah snack untuk menunjang kegiatan lomba Jumlah nasi untuk menunjang kegiatan lomba Jumlah air mineral untuk menunjang kegiatan lomba	750	150 KOTAK	15,00	150 kotak	50,0	150 kotak	55,00	150 kotak	60,50	150 kotak	66,55	750 Kotak	247,05	
				150 KOTAK		150 Kotak		150 Kotak		150 Kotak		150 Kotak		750 Kotak		
				15 dus		15 Dus		15 dus		15 dus		15 dus		75 Dus		
24	Pelaksanaan Upacara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jaat	Jumlah pakaian lomba yang tersedia Jumlah aci-aci penganyaran yang tersedia Jumlah jasa transportasi dan akomodasi untuk penanvaran yang tersedia		1 Paket 1 Paket	40,00	1 Paket 1 Paket	128,5	1 Paket 1 Paket	141,35	1 Paket 1 Paket	155,49	1 Paket 1 Paket	171,03	5 Paket 5 Paket	636,37	
25	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Jumlah pengumuman lelang yang tersedia		32 Paket	48,00	10 Paket	15,0	10 Paket	-	10 Paket	-	10 Paket	-	72 Paket	63,00	
26	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kerja non pegawai		6 Orang	225,57	-	-	-	-	-	-	-	-	6 Orang	225,57	
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	60 bulan	1 Paket	1.826,91	1 Paket	2.408,78	1 Paket	1.385,75	1 Paket	1.524,33	1 Paket	1.676,76	5 Paket	8.822,53	DIPERPA
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas / Operasional yang tersedia		22 unit	407,00	-	550,00	0	-	0	-	0	-	22 Unit	957,00	
7	Pengadaan perlengkapan kantor	: Sepeda Motor Jumlah Perlengkapan kantor yang tersedia :			371,03		219,60		241,56		265,72		292,29		1.390,19	
		- Meja Keria Eselon IV		25 buah		12 Buah								27 buah		
		- Kursi Keria Eselon IV		25 buah		12 Buah								27 buah		
		- Sofa		2 set		-		2 set				2 set		6 set		
		- Gordvn		196 meter		343 meter								539 meter		
		- Vitraoe		196 meter		343 meter								539 meter		
		- Meja Keria Eselon III		1 Buah										1 Buah		
		- Kursi Keria Eselon III		1 Buah										1 Buah		
		- Dressoar		1 Buah										1 Buah		
		- Filling Kabinet		1 Buah				5 Buah						8 Buah		
		- Meja Keria Staf		4 Buah				4 buah						12 Buah		
		- Kursi Keria Staf		4 Buah				5 buah						14 Buah		
		- Lemari Arsip		2 Buah				10 Buah						20 Buah		
		- Meja Rapat		6 Buah				6 Buah						9 Buah		
		- Kursi Rapat		12 Buah				1 Buah						28 Buah		
		- Meja Telepon		3 Buah				8 Buah						3 Buah		
		- Almari Kataloq				2 buah								65 Buah		
		- Album Pegawai						65 Buah						2 buah		
		- White board maonet						1 buah						6 buah		
		- Kursi hadao						3 buah						1 buah		
		- Almari Album pegawai						1 Buah						21 buah		
		- Papan Nama Ruangan						21 Buah						18 buah		
		- Kursi tamu						6 Buah						3 Unit		
9	Penaadaan peralatan kantor	Jumlah Peralatan kantor yang tersedia :		2 unit	488,00	-	887,00	1 Unit	536,80	6 Buah	590,48	6 Buah	649,53	3 Unit	3.151,81	
		Mesin Potong Rumput Gendong		2 unit				1 Unit						3 Unit		
		Komputer PC		17 unit		18 Unit						1 Unit		37 Unit		
		Laptop		5 unit		29 Unit						1 Unit		38 Unit		
		Printer Laser Jet		17 unit		18 Unit						1 Unit		40 Unit		
		Printer warna						2 Unit						15 Unit		
		AC Split 1,5 PK		2 unit		-		1 Unit						4 Unit		
		AC Split 1 PK		2 unit		-		1 Unit						3 Unit		
		AC 2 PK						1 Unit						3 Unit		
		LCD Proyektor + Lavar						2 Unit						1 Unit		
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor		1 Paket	26,00	10 Paket	61	70,00	13 Paket	77,00	13 Paket	84,70	13 Paket	93,17	50 Paket	350,87

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	pemetaan potensi peternakan	Jumlah ternak sapi yang memiliki kartu ternak	30.771 ekor	1 paket	184,98	0	0,00		0		-		-	1 Paket	184,98	
7	Surveilans Pangan di Kabupaten Badung	Terealisasinya penyusunan dokumen pemetaan potensi peternakan Jumlah Buku Data Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan di Kabupaten Badung	30 buku	30 buku	61,34	30 buku	71,71	30 buku	78,88	30 buku	86,76	30 buku	95,44	150 buku	394,13	
8	Penyusunan data luas areal dan produksi tanaman perkebunan	umlah pengambilan Data Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan		4 kecamatan		4 kecamatan	21,27	4 kecamatan	23,39	4 Kecamatan	25,73	4 Kecamatan	28,31	4 kecamatan	98,70	
9	Penyusunan Kajian Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Jumlah Dokumen Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dihasilkan	-	1 dokumen	-	1 dokumen	316,14	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	316,14	
10	Pemetaan Identifikasi kebutuhan Sarana dan prasarana Pertanian di Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen pemetaan yang dihasilkan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	400,00					1 Dokumen		
11	Kajian Pemetaan Kawasan Komoditi Perkebunan di Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen perencanaan		APBD Perubahan (1 dokumen)		APBD Perubahan (1 dokumen)	51,9554									
10	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN	Jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian	15 kali	4 Kali	1.925,09	5 kali	2.098,24	5 kali	3.010,43	5 kali	3.311,48	5 kali	3.642,62	24 Kali	13.987,87	DIPERPA
1	Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan pameran hasil produksi pertanian/perkebunan di dalam daerah dan luar daerah	3 kali	3 kali	264,78	3 Kali	354,35	3 Kali	389,78	3 Kali	428,76	3 Kali	471,64	15 Kali	1.909,32	
2	Festival Budaya Pertanian Di Kabupaten Badung	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung	1 kali	1 kali	1.136,57	1 Kali	1.166,39	1 Kali	1.516,30	1 Kali	1.667,93	1 Kali	1.834,72	5 Kali	7.321,91	
3	Festival Kopi di Kabupaten Badung	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Festival Kopi di Kabupaten Badung						1 Kali	469,09		516,00		567,60	3 Kali	1.552,68	
4	Monitoring Harga Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Daging	Jumlah Jenis Komoditi Pertanian yang dimonitoring harganya di tingkat produsen	7 Jenis	7 Jenis	12,71	7 Jenis	14,03	7 Jenis	15,43	7 Jenis	16,97	7 Jenis	18,67	7 Jenis	77,80	
5	Pasar Tani	Jumlah Keiatan Pasar Tani	1 kali	0	38,11	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Kali	38,11	
6	Pengembangan Aneka Ternak dan Ternak Non Konsumsi (Lomba dan Pameran Burung Berkicau Bupati Badung (in))	Jumlah katagori lomba yang dikompetisikan	8 Kategori	8 Kategori	472,91	8 Kategori	563,48	9 kategori	619,83	9 kategori	681,82	9 kategori	750,00	9 Kategori	3.088,04	
11	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN	Jumlah Produksi pertanian pertahun	120,972 ton	122.500 ton	9.554,32	125.000 ton	10.539,13	127.500 ton	12.203,45	130.000 ton	13.653,23	132.500 ton	15.060,74	132.500 ton	61.010,87	DIPERPA
1	Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Kios yang mendapat Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	24 Kios	24 Kios	59,96	24 Kios	43,56	24 Kios	47,92	24 Kios	52,71	24 Kios	57,98	24 Kios	262,13	
2	Pembibitan Tanaman Perhutanan dan Perkebunan	Jumlah pembibitan tanaman uakara jumlah pembibitan tanaman bibit perkebunan dan kehutanan jumlah tanaman buah-buahan	1400 Pohon 10.000 Pohon 1000 pohon	128,12 1100 Pohon 4200 pohon	128,12 31000 pohon 4200 pohon	312,48 1100 pohon 4200 pohon	343,73 31000 pohon 4200 pohon	378,10 1100 pohon 4200 pohon	378,10 31000 pohon 4200 pohon	415,91 1100 pohon 4200 pohon	415,91 31000 pohon 4200 pohon	415,91 1100 pohon 4200 pohon	415,91 31000 pohon 17800 Pohon	5800 Pohon 134000 pohon	1.578,35	
3	Sosialisasi Benih Padi, Kedelai dan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pupuk dan Benih	8 kali	8 kali	4,739	8 kali	11,08	4 kali	12,19	8 kali	13,40	8 kali	14,75	40 kali	56,15	
4	Penyediaan Pestisida Tanaman Pangan	Jumlah Penyediaan Pestisida	2 Paket	1 Paket	330,85	1 Paket	180,85	1 Paket	198,93	1 Paket	218,83	1 Paket	240,71	6 Paket	1.170,17	
5	Lomba Kelompok Wanita Tani	Jumlah KWT yang mengikuti lomba KWT Tingkat Provinsi Jumlah KWT yang mengikuti verifikasi Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Jumlah KWT yang mengikuti Lomba Cipta menu Tingkat Provinsi Jumlah KWT yang dibina Pengolahan Hasil	1 kelompok	1 kelompok	32,58	1 kelompok	98,57	-	-	1 kelompok	119,27	1 kelompok	131,20	1 kelompok	381,62	
6	Pembinaan dan Pengembangan UPJA	Jumlah Kelompok yang di bina	25 kelompok	25 kelompok	20,16	25 kelompok	168,31	25 kelompok	185,14	25 kelompok	203,66	25 kelompok	224,02	125 kelompok	801,30	
7	Pembangunan Gudang Pupuk	Jumlah Gudang Pupuk yang dibangun	7 unit	7 unit	1.257,26	7 unit	1.276,49	6 unit	1.404,14	7 unit	1.544,55	7 unit	1.699,00	34 unit	7.181,43	
8	Pembinaan dan Pengadaan Sarana Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan Organik	Jumlah kelompok yang serangan OPTnya dapat dikendalikan	5 Kelompok	5 Kelompok	109,53									5 Kelompok	109,53	
9	Temu Teknologi Berorientasi Agribisnis Komoditi Perkebunan	Jumlah Peserta Temu Teknologi Berorientasi Agribisnis Komoditi Perkebunan		300 orang		547,37	270 orang	602,11	300 orang	662,32	300 orang	728,55	1170 orang	2.540,34		
10	Pembinaan dan Pengadaan Sarana Diversifikasi Tanaman Perkebunan	Jumlah pengadaan tanaman perkebunan : Bibit Kelapa Genjah, Bibit Cengkeh, Pupuk Organik Granul	3010 Pohon,6000 pohon, 27030 kg	197,62	13.000 Pohon, 5.000 Pohon, 15.000 Kg	336,75	13.000 Pohon, 5.000 Pohon, 15.000 Kg	370,42	13.000 Pohon, 5.000 Pohon, 15.000 Kg	407,46	13.000 Pohon, 5.000 Pohon, 15.000 Kg	448,21	55010 Pohon, 26000 Pohon, 387030 kg	1.760,46		
11	Pembinaan dan Evaluasi Kelembagaan Usaha Tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT) Perkebunan	Jumlah kelompok tani perkebunan yang dibentuk tingkat Kabupaten Jumlah kelompok tani perkebunan yang dibentuk dan dievaluasi Tk. Provinsi	4 Kelompok	4 Kelompok	29,77	4 Kelompok	26,41	-	-	4 Kelompok	31,96	4 Kelompok	35,16	32 Kelompok	123,30	
12	Pengembangan Tanaman Hortikultura	Jumlah Penyediaan Bibit Loq Jamur Jumlah Penyediaan Bibit Jeruk Siem Jumlah Penyediaan Bibit Bunga Krisan Jumlah Penyediaan benih cabe rawit merah Jumlah Penyediaan benih cabe besar Jumlah Penyediaan benih bawang merah Jumlah budidaya paprika dalam greenhouse	60.000	2.000 Loq 1.600 Pohon 2.000 Pohon	115,04	500 sazet	80 Sazet	80 Sazet	80 Sazet	80 Sazet	80 Sazet	80 Sazet	80 Sazet	192 Sazet 5000 Kg 2 Unit	3.342,15	
13	Pengelolaan Balai Benih Utama (BBU)	Jumlah budidaya tanaman nenas Tabulaoot belimbina dan tambu Kristal Jumlah Benih Padi Bermutu yang disediakan	387.030	1.30 Ton	20,99	1.30 Ton	21,06	50 Buah 1.30 Ton	23,17	50 Buah 1.30 Ton	25,49	50 Buah 1.30 Ton	28,03	20.000 pohon 150 Buah 65 Ton	118,74	
14	Pengembangan Desa Mandiri Benih	Jumlah Gudang Prosesing Benih	2 unit	2 unit	512,19			-	-	-	-	-	-	2 Unit	512,19	
15	Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Badung	Jumlah Petugas yang dilatih IB dan PKB		26 orang		82,04	22 orang	90,24	26 orang	99,26	26 orang	109,19	100 orang	380,73		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
16	Pembinaan usaha agribisnis dan monev kelompok pengolah hasil peternakan	Jumlah kelompok agribisnis dan pengolah hasil peternakan yang di monitoring dan dievaluasi		20 kelompok	6,07	20 kelompok	5,72	12 kelompok /usaha	6,30	20 kelompok	6,93	20 kelompok	7,62	92 kelompok	32,63		
3	Pengelolaan UPT RPH Mambal	Terealisasinya operasional pada UPT. RPH Mambal		1 Unit	81,11	-	21,63	-	46,89	1 Unit	51,58	1 Unit	56,73	1 Unit	257,94		
17	Pengadaan Bibit ternak	Jumlah peralatan yang terpelihara Jumlah peralatan yang tersedia Jumlah bibit ternak yang diadakan		1.303 ekor	2.493,72	12 alat 12 alat	12 alat 12 alat	10 Ekor dan DOC pejection 98.000 ekor	2.646,50	10 Ekor dan DOC pejection 98.000 ekor	2.911,15	10 Ekor dan DOC pejection 98.000 ekor	3.202,27	48 alat 48 alat 295333 Ekor	11.253,64		
18	Pengelolaan sentra peternakan rakyat (SPR)	Terbayarnya upah operasional GPPT Peternak SPR		6 orang	18,31	9 orang	32,71	9 orang	35,98	9 orang	39,58	9 orang	43,54	9 orang	170,13		
19	Pengelolaan sentra ternak sobangan	Jumlah tenaga kerja yang dibayar upahnya pada Sentra Ternak Sobangan		25 orang	753,25	25 orang	893,65	25 orang	983,02	25 orang	1.081,32	25 orang	1.189,45	25 orang	4.900,70		
20	Pembinaan dan Lomba Kelompok Petani Ternak	Jumlah kelompok tani ternak yang dibentuk dan mengikuti lomba		9 kelompok	77,01	9 kelompok	71,20	9 kelompok	78,32	9 kelompok	86,16	9 kelompok	94,77	45 kelompok	407,47		
21	Pengadaan Sarana Sentra Ternak Sobangan	Jumlah Pengadaan: Obat-obatan Jumlah Pengadaan: Bahan alat kerja Jumlah Pengadaan: Makanan Ternak Terlaksananya Pengadaan : Mesin Chopper		1 Paket 11 jenis 2.727.280 kg 2 Unit	2.797,28	1 Paket 11 jenis 3.038.990 kg	3.432,74	1 paket 11 jenis 3.038.990 kg	3.776,01	1 paket 11 jenis 3.038.990 kg	4.153,61	1 paket 11 jenis 3.038.990 kg	4.568,97	5 Paket 55 Jenis 14883240 Kg 2 Unit	18.728,61		
22	Pemanfaatan pekarangan melalui konsep kawasan rumah pangan lestari (KRPL)	Jumlah kelompok yang melaksanakan kegiatan Kawasan Rumah pangan Lestari (KRPL)		6 kelompok	132,25	6 kelompok	286,79	6 kelompok	315,47	6 kelompok	347,02	6 kelompok	381,72	30 kelompok	1.463,25		
23	Pengadaan traktor roda 2	Jumlah Pengadaan Traktor Roda 2		17 unit	376,52	0	-	24 kelompok	46,37	24 kelompok	51,01	24 kelompok	56,11	17 unit	376,52		
24	Pembinaan dan pengembangan UPPO	Jumlah kelompok yang dibentuk		4 subak abian	213,71	4 subak abian	213,71	4 subak abian	235,08	4 subak abian	258,58	4 subak abian	284,44	96 kelompok	215,22		
25	Pembinaan dan pengadaan sarana intensifikasi tanaman kopi	Jumlah Subak Abian yang Dibina dan Mendapatkan Sarana		1 Subak Abian	224,71	1 Subak Abian	224,71	1 Subak Abian	224,71	1 Subak Abian	247,19	1 Subak Abian	271,90	4 subak abian	991,81		
26	Percontohan Budidaya Vanili	Jumlah Subak Abian yang dijadikan percontohan budidaya vanili		2 Subak Abian	208,17	2 Subak Abian	208,17	2 Subak Abian	208,17	2 Subak Abian	228,99	2 Subak Abian	251,89	3 Subak Abian	743,80		
27	Penyusunan kajian idikasi geografis kopi arabika Petang Baduna	Jumlah Subak Abian yang dibina dan mendapatkan sarana		1 Subak Abian	208,17	2 Subak Abian	208,17	2 Subak Abian	208,17	2 Subak Abian	228,99	2 Subak Abian	251,89	6 Subak Abian	689,06		
28	Pengadaan Bibit Ternak Babi	Jumlah Bibit Babi yang diadakan		160 Ekor	201,90	160 Ekor	201,90	160 Ekor	201,90	160 Ekor	201,90	160 Ekor	201,90	160 Ekor	201,90		
29	Kegiatan DED Rehab Gedung RPH Mambal	Jumlah Dokumen perencanaan Bangunan yang tersedia		1 dokumen	30,00	1 dokumen	30,00	1 dokumen	30,00	1 dokumen	30,00	1 dokumen	30,00	1 dokumen	30,00		
30	Pembinaan dan Pengadaan Sarana Pengolahan Pasca Panen Kopi	Jumlah Kelopok yang dibina Jumlah Sarana Pengolahan yang diadakan		1 kelompok 5 Buah	23,21 5 Buah	1 kelompok 5 Buah	23,21 5 Buah	1 kelompok 5 Buah	23,21 5 Buah	1 kelompok 5 Buah	23,21 5 Buah	1 kelompok 5 Buah	23,21 5 Buah	5 kelompok 25 Buah	229,62		
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	55 Orang	45 Orang	1.312,38	45 Orang	2.061,27	45 Orang	1.717,40	45 Orang	1.889,13	45 Orang	2.078,05	45 Orang	9.058,22	DIPERPA	
01	Pengelolaan BPP Mengwi	Luas lahan percontohan tanaman tanaman padi	43 are	43 are	26,26	43 Are	30,32	43 Are	33,35	43 Are	36,68	43 Are	40,35	43 Are	166,95		
02	Pengelolaan BPP Abiansemal	Luas lahan percontohan tanaman jambu kristal	40 are	40 are	16,71	40 are	18,66	40 are	20,53	40 are	22,58	40 are	24,84	40 are	103,31		
		Luas lahan percontohan tanaman palawija	40 Are	40 Are	40 Are	40 Are	40 Are	40 Are	40 Are	40 Are	40 Are	40 Are	40 Are	40 Are	40 Are		
03	Pengelolaan BPP Petang	Luas lahan percontohan tanaman kopi yang dipelihara secara intensif	43 are	43 are	306,49	43 are	107,43	43 are	118,17	43 are	129,99	43 are	142,99	43 are	805,06		
		Luas lahan percontohan tanaman jambu kristal yang dipelihara secara intensif	25 are	25 are	25 are	25 are	25 are	25 are	25 are	25 are	25 are	25 are	25 are	25 are	25 are		
04	Pengelolaan BPP Kuta Utara	Jumlah percontohan hidroponik	1 unit	1 unit	295,12	1 unit	28,08	1 unit	30,88	1 unit	33,97	1 unit	37,37	3 Unit	425,42		
05	Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh	Jumlah Penyuluh yang terpenuhi biaya operasionalnya	50 Orang	50 Orang	148,84	44 Orang	561,77	44 Orang	617,95	44 Orang	679,74	44 Orang	747,71	44 Orang	2.756,01		
06	Penilaian Angka Kredit bagi Pegawai Fungsional	Jumlah pegawai fungsional Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Badung yang mendapat penilaian angka kredit	50 Orang	50 Orang	2,01	44 Orang	2,22	44 Orang	2,44	44 Orang	2,69	44 Orang	2,96	44 Orang	12,32		
07	Pengelolaan BPP Mumbul	Luas lahan percontohan tanaman jeruk, buah naga dan silik	93 Are	93 Are	27,27	93 Are	304,68	93 Are	335,15	93 Are	368,66	93 Are	405,53	93 Are	1.441,30		
08	Bimbingan Teknis Penyuluh Lapangan	Jumlah peserta Bimtek Penyuluh Lapangan	50 Orang	50 Orang	489,68	51 Orang	508,12	72 Orang	558,93	45 Orang	614,82	45 Orang	676,30	72 Orang	2.847,85		
03	Pembangunan Percontohan pada Lahan BPP Petang	Jumlah demplot percontohan paprika	0	0	-	1 unit	500,00	-	-	-	-	-	-	1 Unit	500,00		
13	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Jumlah Kasus Penyakit Ternak yang tertangani	65.427 ekor	30068 Ekor	3.076,30	29521 Ekor	5.847,44	28975 Ekor	3.774,58	28428 Ekor	4.152,04	27335 Ekor	4.567,24	27335 Ekor	21.417,60	DIPERPA	
1	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah Pengadaan : Obat - obatan Jumlah Pengadaan : Vaksin Jumlah Pengadaan : bahan alat kerja Jumlah teraksinasinva : Sapi Jumlah teraksinasinva : babi Jumlah teraksinasinva : anjing Kompensasi vocal culling	2 paket 2 paket 2 paket 17.000 dosis 17.000 dosis 40.000 dosis 1 paket	2 paket 2 paket 2 paket 17.000 dosis 17.000 dosis 40.000 dosis 1 paket	2.960,07	2 paket 2 paket 2 paket 17.000 dosis 17.000 dosis 40.000 dosis 1 paket	3.316,00	1 paket 1 paket 1 paket 17.000 dosis 17.000 dosis 45.000 dosis 1 paket	3.647,60	2 paket 2 paket 2 paket 17.000 dosis 17.000 dosis 40.000 dosis 1 paket	4.012,36	2 paket 2 paket 2 paket 17.000 dosis 17.000 dosis 40.000 dosis 1 paket	4.413,60	9 paket 9 paket 9 paket 85.000 dosis 85.000 dosis 200.000 dosis 5 paket	18.349,65	85.000,00	
2	Pengambilan Sampel dan Uji Laboratorium Penyakit Hewan	Jumlah sampel yang teramati : Darah Sapi Hewan Jumlah sampel yang teramati : Darah Ayam Jumlah sampel yang teramati : Darah Anjing Jumlah sampel yang teramati : Otak Anjing	600 sampel 200 sampel 200 sampel 200 sampel	116,22 600 sampel 200 sampel 200 sampel	600 sampel 200 sampel 200 sampel 200 sampel	115,43 600 sampel 200 sampel 200 sampel	126,98 600 sampel 200 sampel 200 sampel	139,67 600 sampel 200 sampel 200 sampel	153,64 600 sampel 200 sampel 200 sampel	3000 sampel 1000 sampel 1000 sampel 1000 sampel	651,95 1000 sampel 1000 sampel 1000 sampel						
14	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	Jumlah kelompok yang meningkat pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam menerapkan teknologi peternakan ternak rusa	0	5 Kelompok	24,399	5 Kelompok	59,530	5 Kelompok	65,483	5 Kelompok	72,03	5 Kelompok	79,23	25 Kelompok	300,68	DIPERPA	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Bintek Pengembangan Budidaya Sapi Untuk Mendukung SPR (Sentra Peternakan Rakyat)	Jumlah peserta bintek pengembangan budidaya sapi	45 orang	45 orang	24,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 orang	24,40
1	Bintek pengolahan pakan untuk mendukung pelaksanaan UPSUS SIWAB (upaya khusus Sapi Indukan Wajib Rutin)	Jumlah kelompok yang mendapat bimbingan teknis	5 Kelompok	-	-	5 Kelompok	59,53	5 Kelompok	65,48	5 Kelompok	72,03	5 Kelompok	79,23	25 Kelompok	276,28	
15	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS	Jumlah petani/kelompok yang produksi komoditasnya berorientasi pasar	0	13 Kelompok	-	17 Kelompok	7.960,85	21 Kelompok	-	24 Kelompok	-	27 Kelompok	-	27 Kelompok	7.960,85	DIPERPA
1	Pengembangan Agribisnis Ayam Ras Petelur	Jumlah pengembangan agribisnis ayam ras petelur	-	-	43 paket	7.960,85	-	-	-	-	-	-	-	43 paket	7.960,85	
17	PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEWAN YANG ASUH	Tersedianya daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	0	714 Sampel	121,59	714 Sampel	178,92	714 Sampel	196,82	714 Sampel	216,50	714 Sampel	238,15	714 Sampel	951,98	DIPERPA
1	Pemeriksaan bahan pangan hewani	Jumlah pengujian sampel bahan pangan hewani	117591000	600 sampel	91,99	600 sampel	117,73	600 sampel	129,51	600 sampel	142,46	600 sampel	156,70	3000 sampel	638,39	
2	Pemeriksaan ante mortem dan post mortem hewan qurban	Jumlah Masjid yang diperiksa hewan qurbannya		50 Lokasi Tempat Pemotongan Hewan Kurban	15,04									50 Lokasi Tempat Pemotongan Hewan Kurban	15,04	
4	Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem Pemotongan Ternak Bahi	Jumlah Lokasi Desa Adat yang diperiksa terhadap Pemotongan Ternak		122 Lokasi	14,56										14,56	
5	Pemeriksaan Ante Mortem dan Post mortem hewan untuk kegiatan hari-hari besar keagamaan	Jumlah Tempat Pemotongan hewan yang diperiksa	61192400	172 Lokasi tempat Pemotongan		172 Lokasi tempat Pemotongan	61,19	172 Lokasi tempat Pemotongan	67,31	172 Lokasi tempat Pemotongan	74,04	172 Lokasi tempat Pemotongan	81,45	172 Lokasi tempat Pemotongan	283,99	

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN 2016	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Luas tanam komoditi padi, palawija dan hortikultura		18.500 Ha	19.000 Ha	19.500 Ha	20.000 Ha	20.500 Ha
2	Produktivitas Padi	63,18 kw/ha	63,25 Kw/ha	63,40 Kw/ha	63,60 Kw/ha	63,75 Kw/ha	63,90 Kw/ha
3	Produktivitas Cabai		43,20 Kw/ha	45,2 Kw/ha	47,01 Kw/ha	50,70 Kw/ha	52,40 Kw/ha
4	Produktivitas Kedelai	15,00 kw/ha	15,10 Kw/ha	15,15 Kw/ha	15,18 Kw/ha	15,20 Kw/ha	15,20 Kw/ha
5	Produksi Kopi	641 ton	705 Ton	740 Ton	814 Ton	855 Ton	983 Ton
6	Produksi Kakao	362 ton	398 Ton	414 Ton	430 Ton	447 Ton	465 Ton
7	Jumlah petani/kelompok yang produksi komoditasnya berkualitas industri		13 Klp	17 Klp	21 Klp	24 Klp	27 Klp
8	Jumlah populasi ternak		1.500.000 Ekor	1.510.000 Ekor	1.520.000 Ekor	1.530.000 Ekor	1.540.000 Ekor
9	Jumlah Akseptor IB		6.000 Ekor	6.200 Ekor	6.400 Ekor	6.600 Ekor	6.800 Ekor
10	Jumlah Kasus Penyakit ternak		30.068 Ekor	29.521 Ekor	28.975 Ekor	28.428 Ekor	27.335 Ekor
11	Capain realisasi anqqaran Dinas Pertanian dan Pangan		90 %	92 %	93 %	94 %	95 %
12	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan	79,6	80	80,1	80,2	80,3	80,4
13	Jumlah kunjungan yang dilakukan oleh tenaga fungsional	0	5760 kali	5760 kali	5760 kali	5760 kali	5760 kali



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali. Telp./Fax. 0361-9009410

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 954 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2016 – 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 telah disahkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 5750/03/HK/2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
18. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Keputusan Bupati Badung Nomor 2009/03/HK/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
20. Keputusan Bupati Badung Nomor 5750/03/HK/2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2016-2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 26 September 2017
Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
PANGAN KABUPATEN BADUNG,

PUTU OKA SWADIANA,A.PL., S.SOS
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590405 198202 1 012

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.